

**STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PARA
TOKOH STRUKTURAL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL
ULAMA DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA
TIMUR TENTANG *ISBĀT* PEMERINTAH DALAM PENENTUAN
AWAL BULAN QAMARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu
Ilmu Syariah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI K 5-2011 126 45	No. REG 552011/45/126 ASAL BUKU TANGGAL :

Oleh:

SYAFTI
NIM : C51207051

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsyah**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syafi'i
Nim : C51207051
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Isbat* Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011
Saya yang menyatakan,



Syafi'i
C51207051

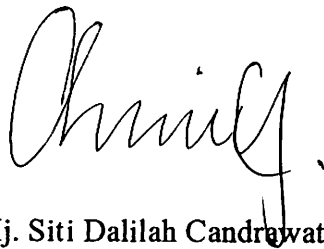
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syafi'i ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syafi'i ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

Sekretaris,

Moh. Hatta, MHI

NIP. 197110262007011012

Penguji I,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag

NIP. 195708171985031001

Penguji II,

A. Kemal Riza, S.Ag, MA

NIP. 197507012005011008

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah NU dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Isbāt* Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Tentang *Isbāt* Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah?, Bagaimana Pandangan Para Tokoh Struktural Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Isbāt* Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah?, dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah NU dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Isbāt* Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif* dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Para Tokoh Struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur sepakat bahwa hukum mengikuti hasil sidang *isbāt* pemerintah tidak wajib. Tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan kewajiban mengikuti *isbāt* pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah. Para Tokoh struktural PWNU Jatim memandang *isbāt* pemerintah sebagai jalan tengah terhadap perbedaan yang terjadi selama ini dalam penentuan awal bulan Qamariah dan hanya wajib diikuti jika dalam pengambilan keputusan berdasarkan *ru'yah* atau *istikmāl*. Sedangkan Tokoh struktural PW Muhammadiyah Jatim berpandangan *isbāt* pemerintah sebagai otoritas dan akan diikuti jika pemerintah dalam memutuskan awal bulan Qamariah berdasarkan *syar'ī* dan data astronomis yang valid.

Menurut Analisis Hukum Islam dengan menggunakan kaidah *ḥukmul ḥākim ilzāmun wa yarfa'ul khilāf* memang tidak ada dalil yang secara *ṣarīḥ* menjelaskan kewajiban mengikuti *isbāt* pemerintah secara mutlak dalam penentuan awal bulan Qamariah. Dalam Islam, hanya ada penjelasan mengenai kewajiban mengikuti pemerintah ketika hukum yang berlaku di negara tersebut adalah negara Islam. Namun, mengingat di Indonesia perbedaan penentuan awal bulan Qamariah cenderung menimbulkan sikap arogansi terhadap sesama umat muslim dan bisa memicu terjadinya perselisihan serta menimbulkan gejolak dalam masyarakat, maka *ūlīl amri* (pemerintah) mempunyai wewenang mengatur demi menghindari dampak negatif (*mazārat*) yang akan muncul.

Dalam menyikapi perbedaan yang ada pemerintah harus bersikap tegas, berusaha keras untuk mencari titik temu bagaimana diperoleh kriteria yang sama dalam penentuan awal bulan Qamariah. Dan bagi para tokoh ormas alangkah lebih bijak jika mengedepankan sikap *legawa* demi kepentingan umat muslim Indonesia. Diperlukan pengembangan alat teknologi yang canggih untuk melihat *hilāl* sehingga dapat mengakomodasi integrasi metode *ru'yah* dan metode *ḥisāb*.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xvi
PERSEMBAHAN	xviii
MOTTO	xix
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II METODOLOGI <i>ISTINBĀT AL ḤUKM IṢBĀT</i> PEMERINTAH RI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH	21

A. Gambaran Umum Tentang <i>Isbāt</i> Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah	21
1. Pengertian <i>Isbāt</i> Pemerintah RI Mengenai Penentuan Awal Bulan Qamariah	21
2. Dasar Hukum <i>Isbāt</i> Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah	22
a. al-Qur'an	22
b. <i>al-Hadīs</i>	23
c. Fatwa Majelis Ulama (MUI)	23
d. Pendapat Fuqāha	26
e. Kaidah-kaidah Fikhiyah	27
f. Peraturan Perundang-undangan	27
3. Sejarah <i>Isbāt</i> Pemerintah RI Mengenai Penentuan Awal Bulan Qamariah	28
4. Mekanisme <i>Isbāt</i> Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah	34
5. <i>Isbāt</i> Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah dari tahun 1987-2010 M/1408-1431 H	37
B. Metode yang Digunakan dalam <i>Isbāt</i> Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah	49
1. Konsep <i>Hilāl</i>	49
2. Cara Menentukan Kemunculan <i>Hilāl</i>	51
3. Akibat Hukum Kemunculan <i>Hilāl</i>	52
4. Yang berwenang Menentukan Awal Bulan Qamariah	54
C. Metode <i>Imkān al-Ru'yah</i> Sebagai Payung Pemersatu Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariah.....	57

BAB III	PANDANGAN PARA TOKOH STRUKTURAL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP <i>ISBAT</i> PEMERINTAH RI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH.....	60
A.	Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Terhadap <i>Isbat</i> Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah	60
1.	Drs. K.H. Syafruddin Syarif.....	61
2.	K.H. Abdurrahman Navis, Lc	64
B.	Pandangan Para Tokoh Struktural Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap <i>Isbat</i> Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah	67
1.	K.H. Muammal Hamidi, Lc.....	68
2.	Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum	70
3.	Drs. Syamsuddin, M. Ag.....	72
4.	Drs. Nadjib Hamid, M. Si	75
BAB IV	STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PARA TOKOH STRUKTURAL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG <i>ISBAT</i> PEMERINTAH RI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH	79
A.	Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang <i>Isbat</i> Pemerintah RI dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah	79
B.	Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang <i>Isbat</i> Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah	86

BAB V	PENUTUP	91
A.	Simpulan	91
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Keputusan Sidang <i>Isbāt</i> Penentuan Awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah di Indonesia dari tahun 1987-2010 M/1408-1431 H...	38
2. Hasil Keputusan Menteri Agama RI Tentang Penetapan 1 Ramaḍān 1381 – 1407 H / 1962 – 1987 M	46
3. Hasil Keputusan Menteri Agama RI Tentang Penetapan 1 Syawal 1381 – 1407 H / 1962 – 1987 M	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan awal bulan Qamariyah penting artinya bagi umat Islam. Sebab, selain untuk menentukan hari-hari besar Islam, juga lebih penting untuk menentukan awal dan akhir bulan Qomariyah terutama pada bulan Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah, karena itu menyangkut ibadah *mahḍah* (ibadah murni). Persoalan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah merupakan masalah klasik, karena sejak awal Islam masalah ini sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang serius. Tetapi ia aktual, karena hampir setiap tahun khususnya menjelang Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah, persoalan ini sering menimbulkan polemik yang berkepanjangan di tanah air Indonesia.¹ Mengingat hal ini sangat berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi.

Bahkan karena menonjolnya perbedaan dalam persoalan ini, ada kesan terjadi bahwa persoalan *ḥisāb ru'yah* hanya ada pada persoalan penentuan awal Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah, yang sejatinya masih ada persoalan lain, selain persoalan awal bulan Qamariah. Yang berarti terjadi generalisasi persoalan

¹ Mukharram, *Penetapan Awal Bulan Qamariah dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, t.t.), 2.

penentuan awal Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah dalam bingkai persoalan *ḥisāb ru'yah*. Padahal pada dasarnya persoalan *ḥisāb ru'yah* ada persoalan lain yang semestinya juga mempunyai *greget* pembahasan. Sebut saja, ada persoalan waktu shalat, penentuan arah kiblat dan penentuan gerhana. Itulah kelebihan persoalannya yang sekaligus merupakan keunikan penentuan awal Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah. Sehingga menjadi *stressing* pembahasan skripsi ini.²

Menurut Ibn Rusyd³ perbedaan penetapan dalam penentuan awal bulan Qamariah (Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah) khususnya Ramaḍān dan Syawal disebabkan pada cara pandang memaknai *ḥadīṣ* yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا أَهْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَافْذُرُوا لَهُ

Artinya:

'Abdullāh bin Maslamah menceritakan kepadaku Mālik dari 'Uqail dari 'Abdullāh bin 'Umar "Sesungguhnya Rasulullāh pernah membicarakan tentang bulan Ramaḍān yang kemudian beliau bersabda "Janganlah berpuasa sehingga kalian telah melihat hilāl dan jangan pula berbuka sehingga melihatnya. Apabila tertutup awan, maka takdirkanlah".

Cara pandang dalam memahami *ḥadīṣ* inilah yang menjadi pangkal perbedaan dalam menetapkan awal dan akhir Ramaḍān. Dari dasar itu,

² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Ḥisāb Ru'yah di Indonesia; Upaya Penyatuan Mazhab Ru'yah dengan Mazhab Ḥisāb*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), vii-viii.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayātul Muḥtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Beirut: Dār Ibn 'Aṣamah, 2005), 228.

⁴ al-Bukhārī Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm, Jilid II, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 38.

muncul dua pemahaman atau golongan dalam menentukan awal Ramaḍān dan awal Syawal. *Pertama, ru'yah*, yaitu melihat *hilāl*⁵ pada akhir Sya'bān atau Ramaḍān pada saat magrib atau *istikmal* (sempurna), yakni menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika *ru'yah* terhalang oleh awan (mendung). Menurut pemahaman golongan *ru'yah*, *ru'yah* dalam kaitan dengan hal ini bersifat *ta'abbudi gair al- ma'qul ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan.⁶

Kedua, hisāb, yaitu dengan menggunakan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan, bumi, dan matahari menurut ahli *hisāb*. Menurut pemahaman golongan ini *hadīs* tersebut termasuk *ta'aqquli al- ma'qul ma'na*, dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diketahui dengan cara menghitung.¹⁰

Berakar dari perbedaan pemahaman itulah, hingga akhirnya terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah, dalam hal ini, khususnya terjadi pada penentuan awal bulan Ramaḍān dan bulan Syawal. Dalam realita, perbedaan metode untuk menentukan awal bulan Hijriah bukan hanya terjadi antara pengguna *ru'yah* dan *hisāb*, akan tetapi perbedaan metode juga terjadi terhadap sesama atau internal pengguna metode, baik dari kalangan pengguna

⁵ *Hilāl* merupakan bulan sabit yang pertama kali terlihat (the first visible crescent). Selanjutnya, bulan itu membesar menjadi bulan purnama dan menipis kembali yang akhirnya menghilang dari langit. Munculnya hilal merupakan tanda atas pergantian bulan, dengan tampaknya hilal bisa ditetapkan kapan awal dan akhir bulan Ramadhan. Lihat Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisāb & Ru'yah, Telaah Syari'ah, Sains Dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 15-16.

⁶ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak*, (Jakarta, CV Tarity Samudra Berlian, 2006), 70.

ru'yah maupun *hisāb*. Perbedaan tersebut terdapat pada cara maupun tolak ukur penilaian terhadap keabsahan hasilnya. Perbedaan internal pengguna metode *ru'yah* antara lain disebabkan (1) perbedaan tentang *maṭla'*.⁷ (2) mengenai *ru'yah bil fi'li* dengan menggunakan alat (*naẓarāh*), para ulama berbeda pendapat.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di internal pengguna *ru'yah*, di internal pengguna *hisāb* juga terdapat berbagai ragam metode penentuan awal bulan Hijriah. Sistem *hisāb* ini dibedakan berdasarkan metode yang digunakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan keberlakuan tempat mengenai hasil perhitungan, karena hasil *hisāb* dapat berlaku di daerah perhitungannya atau dapat dipakai oleh luar daerah bahkan cakupan internasional. Di antara macam-macam *hisāb* itu adalah: *hisāb 'urfi*, *hisāb ḥaqīqī taqrībī*, *hisāb ḥaqīqī taḥqīqī*, *hisāb* kontemporer.⁸

Oleh karenanya, dalam skripsi ini penulis akan memberikan wawasan terkait persoalan penentuan awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah. Dengan pertimbangan agar pembahasannya dapat membumi dan mengindonesia secara konkret, sengaja penulis menggunakan pisau analisis dari kedua ormas NU dan Muhammadiyah melalui pendapat atau *ḥujjah* yang digunakan oleh para tokoh struktural Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada dominasi kedua ormas tersebut, manakala terjadi

⁷ Dalam studi *ru'yah*, istilah *maṭla'* dikenal sebagai batas geografis keberlakuan *ru'yah*.

⁸ Abdul Salam Nawawi, *Ilmu Falak, Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo: Aqaba, 2009), 4.

penentuan awal bulan Qamariah setiap tahunnya, dengan tidak menafikan organisasi lainnya. *Isbāt* pemerintah RI tentang penentuan awal bulan Qamariah, sebagaimana yang akan disinggung berikut ini, semakin memperlihatkan dinamika perbedaan itu berlangsung.

Di lain pihak, sidang *isbāt* yang dilakukan pemerintah RI tentang penentuan awal bulan Qamariah merupakan suatu kegiatan yang selalu dilakukan oleh pemerintah RI dari tahun ke tahun, sebab penentuan awal bulan Qamariah tersebut, baik awal bulan Ramaḍān, 1 Syawal maupun Ḥulhijjah sangat dinantikan oleh umat muslim di Indonesia, khususnya warga Jawa Timur.

Dalam hal menentukan awal Ramaḍān serta hari raya, Rasullullāh SAW memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, sebagaimana terungkap dalam sebuah *hadis* berikut:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمٌ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمٌ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمٌ تَضْحُونَ.⁹

Artinya:

Diceritakan dari Muḥammad bin Ismā'il diceritakan oleh Ibrāhīm bin Munzir diceritakan oleh Ishāq bin Ja'far bin Muḥammad diceritakan oleh 'Abdullāh bin Ja'far dari 'Usmān bin Muḥammad al-Akhnasy dari Sa'id al-Maqbariy dari Abū Hurairah bahwa Nabi SAW berkata: "puasa kalian ditetapkan manakala mayoritas kalian berpuasa. Idul fitri kalian ditetapkan

⁹ Abū 'Isa' Muḥammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, juz II, (Beirut: Dār al Fikr, 1994), 163.

manakala mayoritas kalian beridul fitri, dan idul adha kalian ditetapkan manakala mayoritas kalian beridul adha”

Maksud kandungan hadis ini menurut sebagian ulama’ adalah bahwa puasa dan hari raya hendaknya dilakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Di Indonesia sendiri pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama (Kemenag)¹⁰ dalam penentuan awal bulan Qamariah dibantu oleh Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)¹¹. Dalam fatwanya tertanggal 16 Desember 2003 bertepatan dengan 22 Syawal 1424 MUI mengeluarkan empat butir keputusan, yaitu:

1. Penetapan awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah dilakukan berdasar metode *ḥisāb ru’yah*.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah, Menteri Agama RI wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait.

¹⁰ Dahulu Departemen Agama, kemudian berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan Peraturan presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

¹¹ Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) lahir pada tanggal 27 Juli 1975. Sejarah mencatat pada masa Soeharto berbagai macam upaya untuk mendirikan sebuah wadah bagi ulama’ sudah banyak dilakukan, dan pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama’ tingkat nasional. Empat nama disebut dalam kepanitiaan itu, yaitu: H. Sudirman (pensiunan jenderal angkatan darat), Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi’i, dan KH. Syukri Ghazali. Tiga minggu kemudian muktamar nasional ulama’ dilangsungkan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Pada akhir muktamar dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis dan alim terkenal, Dr. Hamka. Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), 56.

4. Hasil *ru'yah* dari kawasan yang memungkinkan *hilāl* diru'yah, walaupun kawasan itu berada di luar wilayah Indonesia asalkan *maṭla'nya* sama dengan di Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama.

Dengan terbentuknya Departemen Agama (baca: Kementrian Agama) pada tanggal 3 Januari 1946, penetapan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Ḥijjah diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Agama berdasarkan PP. Tahun 1946 no. 2/Um.9/Um jo Keputusan Presiden no. 25 tahun 1967, no. 148 tahun 1968 dan no. 10 tahun 1971.¹² Meskipun demikian, perbedaan pendapat tetap masih mewarnai penetapan awal Ramaḍān, Syawal dan Ḥijjah tiap tahunnya di negeri ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu hal yang aneh dan membingungkan masyarakat, dalam hal ini warga Jawa Timur dimana setiap ormas selalu ikut dalam setiap sidang *isbāt* (penetapan awal-akhir Ramaḍān oleh pemerintah), namun dalam tataran realitanya selalu ada ketetapan dari mereka sendiri (baik dengan bahasa instruksi maupun *ikhbār*).¹³

Di sini, penulis bukan ingin membenarkan atau mengunggulkan pemerintah, atau pendapat-pendapat lainnya, baik dari tokoh NU dan Muhammadiyah ataupun ormas Islam lainnya yang mengeluarkan penetapan awal Ramaḍān yang berbeda-beda. Tetapi terbesit dalam diri penulis, bahwa

¹² Ahmad Izzuddin, *Ilmu*, 16.

¹³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab*, 135.

kenapa bulan yang penuh *rahmah* dan *magfirah* yang memang selalu dinantikan kedatangannya, namun sampai sekarang belum ada kesepakatan terhadap metode apa yang digunakan dalam penetapannya (metode *hisāb* atau metode *ru'yah*). Sehingga seiring dengan perbedaan tersebut terjadi perbedaan pula dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadān.

Dalam skripsi ini, penulis akan langsung memulai dengan menelusuri permasalahan seputar *isbāt* pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan sekaligus penjabaran pandangan para tokoh dari PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur. Sebab selama ini, walaupun sudah banyak karya tulis, baik artikel, buku, skripsi ataupun media lainnya yang mengkaji polemik perbedaan penetapan awal bulan Qamariah yang mencakup awal bulan Ramadān, Syawal dan Zuhijjah tetap saja masih belum mencapai pangkal ujung dari permasalahan tersebut. Menurut penulis, pangkal ujung dari perbedaan penetapan tersebut bermuara pada pandangan para tokoh dari kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu terhadap hasil sidang *isbāt* pemerintah, bukan pada penetapan pemerintahnya. Dan dalam rangka memahami corak perbedaan yang ada melalui pandangan para tokoh kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu dari persepektif Hukum Islam jelas merupakan kerja keilmuan yang perlu dan penting.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Metodologi *iṣṭinbāt al-hukm isbāt* pemerintah RI mengenai penentuan awal bulan Qamariah.
2. Gambaran Umum Tentang *Isbāt* Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah
3. Metode yang Digunakan dalam *Isbāt* Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah.
4. Metode *Imkān al-Ru'yah* Sebagai Payung Pemersatu Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariah.
5. Pendapat para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.
6. Pendapat para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.
7. Studi Hukum Islam terhadap pendapat para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.

Dikarenakan terlalu luas masalah yang teridentifikasi, maka dianggap perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penelitian ini

dapat mencapai sasaran dengan tepat. Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini hanya terbatas mengenai:

1. Pendapat para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.
2. Pendapat para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.
3. Studi Hukum Islam terhadap pendapat para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI dalam menentukan awal bulan Qamariah.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang masalah di atas, maka perlu bagi penulis untuk membuat rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan penulis dalam melakukan kajian atau penelitian. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Qamariah?
2. Bagaimana pandangan para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Qamariah?
3. Bagaimana studi hukum Islam terhadap pandangan para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah?

D. Kajian Pusaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah bukan pertama kali dilakukan, sebelumnya ada beberapa penulis yang telah menulis skripsi mengenai masalah ini.

Skripsi Zakie Fitrie Mustofa dengan NIM C01303012 yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama”¹⁴ arah pembahasannya lebih difokuskan pada perbedaan penetapan 1 Syawal yang terjadi di kalangan Nahdlatul Ulama saja, dengan objek pembahasannya adalah penetapan PWNU dan PBNU Jatim.¹⁴

Skripsi berjudul “Problematika *Ru’yatul Hilāl* dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadān Sepanjang Pendapat Empat Mazhab” yang ditulis oleh Sholehah merupakan kajian literatur yang dikemas dengan studi komparatif. Ia mencoba menjelaskan tentang cara menentukan awal dan akhir Ramadān serta hari raya Idul fitri bilamana *hilāl* tertutup awan, sehingga *ru’yah* tidak berhasil dilakukan. Sementara berdasar data *hisāb* yang diamati posisi *hilāl* sudah di atas ufuk,

¹⁴ Zakie Fitrie Mustofa, *Studi Analisis Terhadap Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama*, skripsi sarjana S1 IAIN Surabaya, 2008, 8.

hanya saja tertutup awan. Ia juga berusaha menjelaskan mengenai pendapat empat mazhab dalam menentukan 1 Ramadān dan 1 Syawal bilamana *hilāl* tertutup awan.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal (Kajian Tentang Otoritas Ulama’) ” yang ditulis oleh M. Sukron Habiburrahman KS 2010 053 SJ. Fokus utama pembahasannya adalah kewenangan pemerintah RI dalam hal ini MUI dalam menentukan 1 Syawal.

Skripsi dengan judul ”Studi Analisis Waktu *Ijtima’* dan Posisi *Hilāl* Menurut Sistem *Hisāb al-Qawā’idul Falaqiyah* dan Ephemeris *Hisāb Ru’yah*” yang ditulis oleh Khoirul Hudallah, 2003. Fokus kajiannya adalah sejauh mana tingkat akurasi sistem *hisāb al-Qawā’idul Falaqiyah* dan ephemeris *hisāb ru’yah* terhadap penghitungan awal bulan Qamariah dan implikasinya terhadap perbedaan kedua sistem tersebut.

Selanjutnya adalah karya Andi Ahmad Zaelany yang berjudul “Menentukan Hari Lebaran Ala Islam Jawa, Kasus Dusun Golak Ambarawa” yang hanya membahas tentang bagaimana menentukan hari raya berdasarkan Islam Jawa atau Aboge yang berada di Dusun Ambarawa.¹⁵

Dari masalah-masalah yang diangkat dalam karyanya itu jelas sekali bahwa fokus kajian yang ditulis oleh Zakie Fitrie Mustofa, Sholehah, M.

¹⁵ Andi Ahmad Zaelany, *Menentukan Hari Lebaran Ala Islam Jawa, Kasus Dusun Golak Ambarawa*, dalam jurnal Ulumul Qur’an, vol VI, 1996.

Syukron Habiburrahman, Khoirul Hudallah, dan Andy Ahmad Zaelany berbeda fokus dengan yang dikaji pada penelitian ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa point, *pertama*, dari segi pembahasannya, pembahasan skripsi ini lebih difokuskan pada kajian terhadap pandangan atau pendapat para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah. *Kedua*, dari segi objek pembahasannya, objek pembahasan skripsi ini adalah pandangan para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah. Dan yang *ketiga* tentang lokasi penelitian pada skripsi ini terbatas pada PW NU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur saja.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang penentuan awal bulan Qamariah yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian *isbāt* penentuan awal bulan Qamariah yang ada pada skripsi ini dengan judul “Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Isbāt* Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah” bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI penentuan awal bulan Qamariah.
2. Untuk mengetahui pandangan para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang *isbāt* pemerintah RI penentuan awal bulan Qamariah.
3. Untuk mengetahui studi hukum Islam terhadap pandangan para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap *isbāt* pemerintah RI tentang penentuan awal bulan Qamariah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu falak khususnya mengenai penentuan awal bulan Qamariah dan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, terutama yang berhubungan dengan pandangan para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur serta pemerintah RI utamanya dalam menentukan awal bulan Qamariah. Terbitnya *ikhbār* atau fatwa serta *isbāt* pada 20 tahun ini, kiranya kian membuat hasil penelitian ini berguna bagi mereka dalam kerangka perumusan kebijakan

publiknya dibidang keagamaan, khususnya berkenaan dengan penentuan awal bulan Qamariah.

- b. Bagi umat Islam pada umumnya, sebagai upaya peneguhan kesadaran kolektif bahwa ajaran agama, termasuk Islam bila sudah turun ke ranah pemikiran para pemeluknya sangat berpeluang untuk *mengejawantah* dalam wajah yang tidak tunggal. Kesadaran seperti ini penting dalam kerangka pengembangan lingkungan sosial umat dimana pluralitas keagamaan diterima sebagai kelaziman, bahkan keniscayaan. Hanya dalam lingkungan sosial seperti itu, *ukhuwwah* dan solidaritas umat dalam bingkai NKRI bersemi dengan sendirinya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah berikut ini:

1. Hukum Islam yang dimaksud adalah metodologi *istinbāt al hukm* dimana kaca mata yang digunakan untuk menganalisis objek pada penelitian ini adalah kaidah fiqh yang berbunyi “*ḥukmul ḥākim ilzāmun wa yarfa’ul khilāf*”.
2. Pandangan : pendapat atau argumentasi yang didasarkan pada *ḥujjah* dan dalil nash al-Qur’an atau al-Hadīf.

3. Tokoh struktural : para personalia yang menduduki jabatan kepengurusan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang berkompeten pada bidang hukum Islam serta ilmu falak. Antara lain adalah Drs. KH. Syafruddin Syarif, KH. Abdurrahman Navis, Lc, (tokoh PWNU), kemudian KH. Muammal Hamidi, Lc, *Ustāz* Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum, Drs. Syamsuddin, M. Ag, dan Drs. Nadjib Hamid, M. Si.
 4. *Īsbāt* pemerintah RI : penetapan pemerintah RI yang dilakukan oleh Menteri Agama mengenai penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah dalam satu sidang.
 5. Bulan Qamariah : yang dimaksud adalah Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah.
- Pemilihan ini menjadi hanya tiga bulan saja tak lain karena ketiga bulan tersebut mempunyai nilai-nilai penting yang bertalian pada pelaksanaan ibadah. Seperti pelaksanaan ibadah puasa, hari raya dan shalat id.

Dari beberapa pengerian istilah di atas, maka yang dimaksud judul skripsi “Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Īsbāt* Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah” adalah penelitian ilmiah dengan menggunakan kaca mata kaidah fiqh “*ḥukmul ḥākim ilzāmun wa yarfā’ul khilāf*” terhadap pendapat atau argumentasi para tokoh Pengurus Wilayah NU dan Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur yang menduduki jabatan dalam PWNU atau PW

Muhammadiyah mengenai *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

a. Pendapat para tokoh PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah yang berupa pemikiran-pemikirannya, *hujjah* yang digunakan dalam menginterpretasikan keberadaan *isbāt* pemerintah.

b. Dokumen hasil sidang *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah yang berupa penetapan dari tahun 1987-2010 M/1408-1431 M. Arsip-arsip putusan Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

2. Sumber Data

a. Informan, yaitu sekelompok orang yang memberikan informasi sebagai penunjang kesempurnaan proses pengumpulan data pada penelitian ini, yang mereka tidak terlibat secara langsung. Antara lain terdiri dari para tokoh PWNU atau PW Muhammadiyah Jawa Timur yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam penelitian ini. Antara lain adalah KH. Jazuli Nur (tokoh PWNU), dan *Ustāz* Afifun Nidzom (PW Muhammadiyah) serta *Ustāz* Ruchman Basori (Kemenag RI).

- b. Responden, yaitu sekelompok orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yakni para tokoh struktural PWNU atau PW Muhammadiyah Jawa Timur yang terdiri dari: Drs. KH. Syafruddin Syarif, KH. Abdurrahman Navis, Lc, (tokoh PWNU), kemudian KH. Muammal Hamidi, Lc, dan *Ustāz* Drs. H. Akh. Mukarrom, M. Hum, Drs. Syamsuddin, M. Ag, Drs. Nadjib Hamid, M. Si (PW Muhammadiyah Jatim).
- c. Kumpulan putusan-putusan penentuan awal bulan Qamariah PWNU Jawa Timur yang terhimpun dalam *Ahkāmul Fuqahā*.
- d. Kumpulan putusan penentuan awal bulan Qamariah PW Muhammadiyah Jawa Timur, yang terhimpun dalam buku Kumpulan Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada para responden dan informan, seperti Drs. KH. Syafruddin Syarif, KH. Abdurrahman Navis, Lc (tokoh PWNU), kemudian KH. Muammal Hamidi, Lc dan *Ustāz* Drs. H. Akh. Mukarrom, M.Hum, Drs. Syamsuddin, M. Ag, Drs. Nadjib Hamid, M. Si.
- b. Dokumentasi yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam serta mencari data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang tersimpan berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif yang kemudian disimpulkan dengan menggunakan logika induktif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan pandangan atau pendapat para tokoh struktural PWNU, PW Muhammadiyah Jawa Timur dalam menentukan awal bulan Qamariah yang kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif. Metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang penentuan awal bulan Qamariah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan mempermudah peneliti dalam penulisan penelitian yang akan dilakukan, maka disusunlah skripsi ini dalam lima bab.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* tentang metodologi *istinbāt al-ḥukm isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah.

Bab *ketiga* merupakan uraian tentang hasil penelitian yang berupa pendapat para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur dalam penentuan awal bulan Qamariah.

Selanjutnya adalah bab *keempat* tentang analisis pendapat para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah.

Bab *kelima* merupakan bab terakhir dalam kerangka skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

METODOLOGI *ISTINBĀT AL ḤUKM ISBĀT* PEMERINTAH RI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH

A. Gambaran Umum Tentang *Isbāt* Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

1. Pengertian *Isbāt* Pemerintah RI Mengenai Penentuan Awal Bulan Qamariah

Secara bahasa kata *isbāt* berasal dari kata dasar *aṣbata - yuṣbitu - isbatan* yang artinya menetapkan atau penetapan. *Isbāt* juga bermakna *barhanat* dan *izhāri* yang memiliki arti penetapan, kepastian dan verifikasi. Selain itu *isbāt* juga memiliki makna *ta'kid* yang berarti pengukuhan atau konfirmasi.¹ Namun istilah yang dimaksud *isbāt* dalam hal ini adalah hak dan wewenang Pemerintah RI – dalam hal ini Menteri Agama – untuk menetapkan awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah. *Isbāt* dikeluarkan dalam sidang yang diadakan serta secara khusus dan dipimpin oleh Menteri Agama.²

Jadi dapat ditarik definisi bahwa *isbāt* Pemerintah RI adalah penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah RI, dalam hal ini yakni Menteri Agama dalam penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah,

¹ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 21.

² Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Hisāb Ru'yah NU*, (Jakarta: LF NU, 2006), 5.

sehingga memiliki kekuatan hukum yang dapat memberikan efek keharusan ditaati oleh siapapun yang berada di suatu negara dan wilayah tersebut.

2. Dasar Hukum *Isbāt* Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah

a. al-Qur'an

Sebagai pedoman pokok dan sumber bimbingan Allah Swt. kepada hamba-Nya, al-Qur'an adalah satu-satunya penuntun setiap amal perbuatan agar sesuai dengan maksud hakiki sebagai seorang hamba. Oleh karenanya, peletakan al-Qur'an pada posisi utama sumber hukum Islam merupakan suatu keniscayaan.³ Ada dua sifat yang dianut al-Qur'an dalam masalah hukum. *Pertama*, hukum yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa dan bagi seluruh umat. Terhadap hukum yang bersifat tetap itu, al-Qur'an menyebutnya secara terinci. *Kedua*, hukum yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi kaidah-kaidah hukum. Pedoman ini berasaskan: keadilan, persatuan, persamaan, kebersamaan, musyawarah, perdamaian, pengakuan hak individu dan tanggung jawab, baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab sosial, menyampaikan amanah serta tidak memberatkan.

Dalam hal penentuan awal bulan Qamariah, *nash* al-Qur'an yang dijadikan pijakan hukum dalam *isbāt* Pemerintah RI adalah surat An-Nisa': 59 sebagai berikut:

³ Nasr Hamid Abū Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an terj. Maḥmūd an-Naṣ Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'an* (penerjemah: Khoiron Nahdliyyin), cet. II, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasūl-Nya), dan ūlil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasūl (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b. *al-Ḥadīs*

Nas *ḥadīs* yang dijadikan pijakan hukum dalam *isbāt* Pemerintah RI,

diantaranya adalah:

Ḥadīs Riwayat al-Bukhārī dari Irbad ibn Sariyah

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وَلَّى عَبْدٌ حَبَشِيٌّ⁴

“Wajib bagi kamu untuk mendengar dan taat walaupun yang memimpin kamu adalah hamba dari Habsyi”

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa MUI dalam pengertiannya hampir mirip dengan pemikiran Ibn

Taimiyah⁶ dalam memberikan definisi *ijmā'* bahwa makna *ijmā'* adalah

⁴ Baca: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Jakarta tanggal 16 Desember 2003 M/22 Syawal 1424 H.

⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 547.

kesepakatan seluruh umat Islam terhadap sesuatu hukum. Apabila telah *ṣubūt ijma'* umat (para *mujtahidīn*) terhadap sesuatu hukum, maka tak boleh lagi seorang pun keluar dari *ijma'* itu, karena umat itu (para *mujtahidīn*) tidaklah bersepakat terhadap kesesatan. Maksud para *mujtahidīn* disini adalah para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lewat fatwanya menyerukan kepada umat muslim Indonesia untuk mengikuti ketetapan (*isbāt*) awal bulan Qamariah yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Beberapa fatwa itu antara lain: Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penentuan Awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah. Menyatakan bahwa “seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang Penetapan Awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah”.⁷

Selain itu, Fatwa MUI nomor: Kep-276/MUI/VII/1981 tentang Idul Fitri 1401 H/1981 M di Indonesia. Data yang diambil, *ijtimā'* terjadi pada hari Jum'at, 31 Juli 1981/29 Ramaḍān 1401 H, jam 10:03, tinggi *hilāl* 3' 59" *hilāl* yang setinggi itu mudah dilihat. Tanggal 1 Syawal 1401 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Agustus 1981 M. Sekiranya *hilāl* tidak dapat dilihat, maka *hilāl* yang telah setinggi apa yang tersebut di atas dapat

⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 187.

⁷ T. Djamaluddin, “*Imkān al-Ru'yah*: Parameter Penampakan Sabit *Hilāl* dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia),” makalah ini disampaikan pada *Acara Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Ru'yah Nabdhlatul Ulama*, diselenggarakan oleh Lajnah Falakiyah PBNU, Semarang 17-23 Desember 2006, 2.

dijadikan pedoman untuk menentukan awal atau akhir Ramaḍān. Fatwa MUI tersebut antara lain mengambil dasar dalil dalam kitab *Ḥāsyiyah as-Syarwāni ‘ala Tuḥfah al-Muḥtāj*, karya ‘Abd. al-Ḥāmid As-Syarwānī juz 2 hal. 374 menyatakan: “sekiranya *ḥisāb qat’i* yang menunjukkan adanya *hilāl* setelah terbenam matahari dan *hilāl* itu semestinya dapat dilihat, tetapi karena sesuatu hal tidak dapat dilihat, maka keadaan itu cukup dijadikan pedoman penetapan awal atau akhir Ramaḍān”.⁸

Sebelum mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, melalui *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Jakarta, MUI mengeluarkan fatwa tentang penentuan awal Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah. Fatwa tertanggal 16 Desember 2003 M. (22 Syawal 1424 H) tersebut memuat empat butir keputusan sebagai berikut:

- a) Penetapan awal Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah dilakukan berdasarkan metode *ru’yah* dan *ḥisāb*;
- b) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait;

⁸ *Ibid*, 4.

- c) Dalam menetapkan awal Ramadān, Syawal, dan Zuhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait;
- d) Hasil *ru'yah* dari kawasan yang memungkinkan *hilāl* dapat di-*ru'yah*, walaupun kawasan itu berada di luar wilayah Indonesia, asalkan *matla'*nya sama dengan Indonesia, dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, di samping me-fatwa-kan kepada umat Islam di Indonesia untuk mengikuti Pemerintah RI, dalam fatwa tersebut juga ada rekomendasi untuk mengupayakan kriteria penentuan awal bulan yang disepakati dan menjadi acuan bersama. Secara tidak langsung fatwa tersebut juga didukung dengan hasil Kongres Umat Islam Indonesia 2005 yang menyatakan agar MUI menjadi payung pemersatu umat.⁹

d. Pendapat Fuqahā

وَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجِبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْحُكْمُ
إِجْمَاعًا. قَالَ لَهُ التَّوَاوِيُّ فِي جَمْعِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ
رَمَضَانَ.¹⁰

⁹ *Ibid.*, 5-6.

¹⁰ Muhammad Syaṭa' al-Dimyati, *I'ānah at-Tālibīn*, juz V, (Semarang: Karya Toha Putera, t.t.), 357.

“Yang diperselisihkan adalah apabila pemerintah RI tidak menentapkannya. Jika Pemerintah RI menentapkannya, maka puasa wajib atas semuanya dan secara ijma’ penetapan itu tidak dapat digugurkan. Untuk itu Imam an-Nawāwī berkata dalam kitab Majmu’nya, adalah jelas bahwa sesungguhnya menjadi kewenangan qādi untuk menetapkan keberadaan malam itu sebagai bagian dari Ramaḍān”.

e. Kaidah-kaidah Fikhiyah

• حُكْمُ الْحَاكِمِ إلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ¹¹

“Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perbedaan silang pendapat.”

• تَصَرُّفُ إِمَامٍ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ¹²

“Kebijakan imam atas rakyatnya harus didasarkan kemaslahatan”

• إِنَّ إِيْتِهَادَ أُولِي الْأَمْرِ هُوَ الْأَصْلُ الْثَالِثُ مِنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَإِنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَأْيَهُمْ وَجَبَ عَلَى الْعَامَّةِ وَعَلَى حُكَّامِهَا الْعَمَلُ بِهِ¹³

“Sesungguhnya ijtihad (keputusan) pemerintah merupakan sumber syari’at Islam yang ketiga. Ketika pendapat pemerintah sudah menjadi kesepakatan, maka wajib hukumnya bagi masyarakat dan para penegak hukum menjalankan keputusan tersebut.”

f. Peraturan Perundang-undangan

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

¹¹ ‘Abd. al-Ḥāmid As-Syarwānī, *Ḥāsyiyah as-Syarwānī ‘ala Tuḥfah al-Muḥtāj*, (Mesir: Maktabah Tijāriyah Kubrā, t.t.), III, 383.

¹² As-Suyūṭī, *‘Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī al-furu’*, cet. I, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), 83-84.

¹³ Ibrahīm al-Bājūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī ‘ala Ibni al-Qāsim*, juz I, (Dār Kutub al-Islamy, t.t.), 286.

- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- c) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- d) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- e) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;¹⁴

3. Sejarah *Isbāt* Pemerintah RI Mengenai Penentuan Awal Bulan Qamariah

Sejak zaman kekuasaan kerajaan di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran *hisāb*, yang ditandai dengan penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi. Setelah muncul penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi Pemerintah RI. Semula kalender Hijriyah diubah menjadi kalender masehi. Meskipun demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriyah, terutama di daerah-daerah kerajaan Islam. Tindakan ini tidak dilarang oleh Pemerintah RI kolonial Belanda, bahkan penetapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama penetapan terhadap hari-

¹⁴ Baca: Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Tanggal 1 Zūlhijjah 1431 H.

hari yang ada hubungannya dengan persoalan peribadatan, seperti tanggal 1 Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah.¹⁵

Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu atau Tahun Saka yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78M, yakni Tahun penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Saka). Dan kalender inilah yang digunakan oleh umat Budha di Bali guna mengatur kehidupan masyarakat dan agama.¹⁶

Patut dicatat juga satu peristiwa penting dan bersejarah, yaitu penggabungan penanggalan Hindu Jawa (Saka) tersebut yang berdasarkan peredaran matahari dengan penanggalan Hijriyah. Hal ini merupakan suatu ciptaan baru yang perlu dicatat dalam sejarah, dikatakan baru dalam arti merubah suatu masyarakat lama kepada masyarakat baru (masyarakat kehindu-hinduan menuju masyarakat keislaman).¹⁷

Harus diakui bahwa pada abad ke-17 sampai abad ke-19 pemikiran *ḥisāb* di Indonesia tidak bisa lepas dengan pemikiran *ḥisāb* negara-negara Islam lainnya. Bahkan tradisi ini masih kentara pada awal abad ke-20. Hal ini seperti tercermin dalam kitab *Sullamun Nayyirain* karya Muhammad

¹⁵Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi atas Pemikiran Sa'adoeddin Djambek*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 10.

¹⁶Ahmad Izzuddin, *Fiqh Ḥisāb Ru'yah di Indonesia; Upaya Penyatuan Mazhab Ru'yah dengan Mazhab Ḥisāb*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 48.

¹⁷Susiknan Azhari, *Pembaharuan*, 11.

Manṣur bin Abd Hāmid bin Muhammad Dāmīry al-Batawi (1925) yang terpengaruh oleh sistem Ulugh Bek.¹⁸ Ilmu *ḥisāb* ini berkembang dan tumbuh subur terutama di pondok-pondok pesantren di Jawa dan Sumatera. Dan sampai sekarang khazanah (kitab-kitab) *ḥisāb* di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak apalagi banyak pakar *ḥisāb* sekarang yang menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat disamping adanya kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar astronomi dalam mengolah data-data komputer berkaitan dengan *ḥisāb ru'yah*.¹⁹

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa pada masa penjajahan persoalan penentuan awal-awal bulan yang berkaitan dengan persoalan ibadah diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Lalu setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai diadakan perubahan. Dan setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1945, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur (termasuk penetapan 1 Ramaḍān, 1 Syawal, dan 10 Zūlhijjah) diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah RI Tahun

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Ru'yah*, 49-50.

1946 No. 2/um, 7/um jo Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1967, No. 148 Tahun 1968 dan No. 10 Tahun 1971.²⁰

Hanya saja dari Tahun 1946 tugas Departemen Agama kala itu hanya menetapkan hari libur nasional saja, belum secara resmi memiliki kewenangan dalam menetapkan awal bulan Qamariah. Namun sejak Tahun 1962 telah dimulai penetapan dari Departemen Agama mengenai awal ketiga bulan tersebut, ini dapat dibuktikan dengan sudah adanya keputusan Menteri Agama tentang permulaan tanggal awal bulan Ramadān dan Syawal 1381 H.²¹

Meskipun penetapan hari libur telah diserahkan kepada Departemen Agama, tetapi pada wilayah etis-praktis sampai saat ini masih belum seragam, terutama dalam penentuan 1 Ramadān, 1 Syawal dan 10 Zūlhijjah . Bahkan perbedaan ini menjadi penyebab perseteruan (tidak saling menyapa) dan mengusik *ukhuwah* di antara sesama muslim, disebabkan melakukan suatu peribadatan tidak bersama.²² Inilah dampak adanya perbedaan pemahaman antara beberapa pemahaman yang ada dalam wacana *hisāb* dan *ru'yah*.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ BADILAG BIMAS Dep. Agama RI *Himpunan Keputusan Penetapan 1 Menteri Agama Tentang Ramadān dan 1 Syawal Tahun 1381-1418 H/ 1997 M*, (Jakarta: Badilag BIMAS, 1999-2000), 3.

²² Susiknan Azhari, *Pembaruan*, 11-12.

²³ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Ru'yah*, 50.

Memperhatikan fenomena tersebut akhirnya Pemerintah RI (dalam hal ini Departemen Agama) berusaha untuk mempertemukan pola pikir yang berkembang dalam masyarakat (kalangan ahli *ḥisāb* dan *ru'yah*) melalui musyawarah dan konferensi untuk membicarakan hal-hal yang dianggap menimbulkan pertentangan dalam menetapkan hari-hari besar Islam terutama penetapan awal Ramaḍān, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam musyawarah ini dapat dinetralisir perbedaan-perbedaan yang muncul. Dan yang lebih penting lagi musyawarah mendesak kepada Menteri Agama untuk membentuk lembaga *ḥisāb* dan *ru'yah*.²⁴

Untuk merealisasikan terbentuknya Lembaga *Ḥisāb* dan *Ru'yah* Departemen Agama tersebut, maka ditunjuk tim perumus sebanyak lima orang dari tiga lembaga. Lima orang yang dimaksud adalah: (a) Departemen Agama: A. Wasit Aulawi, H. Zainal Ahmad Noeh dan Sa'adoeddin Jambek, (b) Lembaga Metereologi dan Geofisika: Susanto, (c) Planetarium: Susanto Nitisastro. Selanjutnya tim perumus mengadakan pertemuan. Dari beberapa kali pertemuan yang diadakan akhirnya pada pertemuan tertanggal 23 Maret 1972 team perumus mengambil kesimpulan, yaitu: (a) Bahwa tujuan dari Lembaga *Ḥisāb* dan *Ru'yah* ialah mengusahakan persatuan dalam menentukan tanggal 1 Ramaḍān, 1 Syawal dan 10 Žuhijjah, (b) Bahwa status Lembaga *Ḥisāb* dan *Ru'yah* adalah resmi (Pemerintah RI) dan berada

²⁴ *Ibid.*

di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta, (c) Bahwa tugas dari Lembaga *Hisāb* dan *Ru'yah* adalah memberi saran kepada Menteri Agama dalam menetapkan permulaan tanggal Qamariah dan (d) Bahwa keanggotaan Lembaga *Hisāb* dan *Ru'yah* terdiri dari anggota tetap (inti) dan anggota tersebar. Anggota tetap mencerminkan 3 unsur, yakni: (1) unsur Departemen Agama, (2) unsur ahli falak/*hisāb* dan (3) unsur ahli hukum Islam/ulama.²⁵ Dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan *Hisāb* dan *Ru'yah* Departemen Agama.

Selanjutnya Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 77 tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 telah menentukan susunan personalia Badan *Hisāb* dan *Ru'yah* Departemen Agama yang diketuai oleh Sa'adoeddin Jambek, Wasit Aulawi, MA sebagai wakil ketua, Drs. Djabir Manshur sebagai sekretaris, kemudian sebagai anggota Z.A. Noeh, Drs. Susanto (L.M.C), Drs. Santoso BA, Rodi Saleh, Djunaidi, Kapten Laut Muhadji, Drs. Peunoh Dali, dan Sjarifuddin BA.²⁶ Sampai sekarang, Badan tersebut masih ada. Dan diketuai oleh Rohadi Abdul Fatah, dan setiap propinsi sudah dibentuk Badan *Hisāb* dan *Ru'yah*.

²⁵ BADILAG Mahkamah Agung RI, *Almanak Hisab Rukyah*, (Jakarta: BADILAG, 2007), 74-75.

²⁶ *Ibid.*

Adapun anggota tersebar diserahkan penyelesaiannya oleh Direktur Jenderal Bimas Islam dan pada tanggal 23 September 1972, para anggota Badan *Hisāb* dan *Ru'yah* Departemen Agama dilantik oleh Menteri Agama Mukti Ali. Dalam pidato pengarahannya beliau mengatakan bahwa latar belakang dibentuknya Badan *Hisāb* dan *Ru'yah* ini adalah:

1. Masalah *hisāb* dan *ru'yat* awal tiap bulan Qomariyah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam.
 2. Hari-hari besar itu erat sekali hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di negeri kita ini, juga erat hubungannya dengan pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa setanah air.
 3. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan negara.²⁷
 4. Mekanisme *Isbāt* Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah
- Untuk menghindari perbedaan penentuan awal bulan Qamariah dipandang perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan tertinggi di masyarakat yang dalam hal ini adalah diserahkan kepada hakim atau *qādi*.

²⁷ BADILAG BINBAGA ISLAM Dep. Agama RI, *Pedoman Teknik Ru'yah*, (Jakarta: BADILAG BINBAGA ISLAM, 1983-1984), 102.

Hakim atau *qādi* merupakan kepanjangan dari *ūlī al-amri* (Pemerintah RI), sedangkan di Indonesia wewenang tersebut dipegang oleh Menteri Agama.

Sedangkan mekanisme penentuan awal bulan sebagai berikut:

1. Menghimpun data *hilāl* menurut *hisāb* yang beredar di masyarakat serta melakukan pembahasan sebagai bahan penyusunan kalender penanggalan dan sidang *isbāt* penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah oleh pemerintah RI.
2. Pemerintah RI (Departemen Agama RI) memberikan instruksi serta himbauan kepada jajaran di bawahnya dan ormas-ormas Islam untuk melakukan *ru'yatul hilāl* pada hari ke 29 bulan Sya'bān, Ramaḍān, dan Żuqāda, dan pada bulan-bulan lainnya yang dipandang perlu.
3. Hasil *ru'yah* perlu mendapat pengesahan Pengadilan Agama dan kemudian secepat mungkin dilaporkan kepada Pemerintah RI (Menteri Agama) melalui media yang ada sebagai bahan sidang *isbāt*.
4. Pemerintah RI melakukan sidang *isbāt* penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah yang dipimpin oleh Menteri Agama atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya.
5. Sidang *isbāt* dihadiri oleh MUI²⁸, wakil-wakil ormas Islam, instansi terkait, dan perorang ahli di bidang *hisāb-ru'yah* untuk konsolidasi

²⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M (17 Rajab 1395 H) dalam suatu pertemuan nasional ulama Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama

dalam pengambilan keputusan serta koordinasi dalam sosialisasi keputusannya.

6. Hasil sidang *isbāt* merupakan Keputusan Menteri Agama RI yang sesegera mungkin diinformasikan kepada masyarakat umum lewat media elektronik maupun media cetak yang ada. Diinformasikan pula kepada masyarakat bahwa Keputusan Menteri Agama RI mengikat bagi seluruh rakyat Indoneisa sehingga merupakan suatu kewajiban untuk mengikutinya.²⁹

Secara teknis pelaksanaan sidang *isbāt* selalu menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan, dan demokratis, serta menerima saran dan pendapat dari peserta sidang, setelah saran dan pendapat dibahas dan diterima, dengan suasana bersama-sama berupaya mencari keputusan yang terbaik, lalu mengambil musyawarah mufakat, bulat dan maslahah, maka sidang memutuskan “Penetapan tanggal 1 Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah ”.

Indonesia. Sesuai dengan namanya, MUI merupakan wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia, wadah yang tidak bersifat operasional tetapi koordiantif. Dalam konteks kehidupan beragama dan berbangsa, fungsi MUI sangat strategis, yaitu (1) memberi fatwa nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, yakni sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar*, (2) memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama; (4) menjadi penghubung, antara ulama dan pemerintah serta menjadi penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat beragama guna menyukkseskan pembangunan nasional. lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum di Indonesia, 1975-1988*, edisi dwibahasa, (Jakarta: INIS, 1993), 56.

²⁹ Nasaruddin Umar, “Memahami Hak *Isbāt* dalam Perspektif Fiqih Siyasaḥ,” makalah ini disampaikan pada *Acara Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Ru'yat Nahdlatul Ulama*, diselenggarakan oleh Lajnah Falakiyah PBNU, Semarang, 17-23 Desember 2006, 2-3.

5. *Īsbāt* Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah dari tahun 1987-2010 M/1408-1431 H

Sejak berlakunya *īsbāt* Pemerintah RI sebagai jalan tengah dalam perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah —terutama Ramaḍān, Syawal, dan Żulhijjah —telah menelorkan beberapa hasil sidang *īsbāt* yang berkaitan dengan awal dari ketiga bulan bulan Qamariah tersebut dari tahun ke tahun.

Berikut data hasil Keputusan Sidang *Īsbāt* yang diselenggarakan oleh Pemerintah RI cq. Departemen Agama RI dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama untuk penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah selama 20 tahun ke belakang 1988.

Tabel 1

Hasil Keputusan Sidang *Isbāt* Penentuan Awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah di Indonesia dari tahun 1987 sampai tahun 2010
M atau 1408-1431 H³⁰

Tahun	Bulan	<i>Ijtima'</i> (WIB)	Tanggal <i>Ru'yah</i>	Tinggi <i>Hilāl</i>	Hasil <i>Isbāt</i>	Awal Bulan	Keterangan
1431	Żulhijjah	06/11/10 11:53	06/11/10	1" 13"	<i>Istikmāl</i>	08/11/10	-
	Syawal	04/09/10 17:32	08/09/10	-2" 24"	<i>Istikmāl</i>	10/09/10	Indonesia, Saudi Serempak
	Ramaḍān	10/08/10 10:10	10/08/10	2' 29"	<i>Ru'yah</i>	11/01/10	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cilincing, Probolinggo, Bengkulu, Condrodipo DITERIMA
1430	Żulhijjah	17/11/09 00:16	17/11/09	5" 25"	<i>Ru'yah</i>	18/11/09	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Tim <i>Hilāl</i> Semarang DITERIMA (CCD)
	Syawal	11/09/09 01:45	19/09/09	5" 23"	<i>Ru'yah</i>	20/09/09	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> dari Sukabumi dan Cakung DITERIMA
	Ramaḍān	20/01/09 17:04	20/08/09	-2" 01"	<i>Ru'yah</i>	22/08/09	Indonesia, Saudi Serempak Klaim NU <i>Ru'yah</i> pada 21/08/09 berhasil
1429	Żulhijjah	27/11/08 23:56	27/11/08	-4" 43"	<i>Istikmāl</i>	29/11/08	Indonesia, Saudi Serempak
	Syawal	29/09/08 15:14	29/09/08	-1" 42"	<i>Istikmāl</i>	01/10/08	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	31/08/08 03:00	31/08/08	3" 03"	<i>Ru'yah</i>	01/09/08	Indonesia, Saudi Serempak Klaim Gresik, Jogja, lampung, Johar DITERIMA

³⁰ BADILAG BIMAS ISLAM Dep. Agama RI, *Himpunan Keputusan Menteri Agama*, 1-5.

1428	Žulhijjah	10/12/07 ⁻ 00:42	09/12/07	-4" 02"	<i>Istikmāl</i>	11/12/07	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Syawal	11/10/07 ⁻ 12:02	11/10/07	0" 22"	<i>Istikmāl</i>	13/10/07	Klaim Cakung DITOLAK Muh. dan Saudi (H-1)
	Ramaḍān	11/09/07 ⁻ 19:46	11/09/07	-2" 22"	<i>Istikmāl</i>	13/09/07	Indonesia, Saudi Serempak
1427	Žulhijjah	20/12/06 ⁻ 21:02	20/12/06	-2" 04"	<i>Istikmāl</i>	22/12/06	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Syawal	22/10/06 ⁻ 12:16	22/10/06	0" 31"	<i>Istikmāl</i>	24/10/06	Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung, Bangkalan DITOLAK Muh., NU dan Saudi (H-1)
	Ramaḍān	22/09/06 ⁻ 11:45	22/09/06	-1" 44"	<i>Istikmāl</i>	24/11/06	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
1426	Žulhijjah	31/12/05 ⁻ 10:14	31/12/05	4" 10"	<i>Ru'yah</i>	01/01/05	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung dan Malang DITERIMA
	Syawal	02/11/05 ⁻ 08:25	02/11/05	2" 52"	<i>Ru'yah</i>	03/11/05	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung dan Gersik DITERIMA
	Ramaḍān	03/10/05 ⁻ 17:30	03/10/05	-1" 04"	<i>Istikmāl</i>	05/10/05	Indonesia, Saudi Serempak
1425	Žulhijjah	10/01/05 ⁻ 19:03	10/01/05	-0" 23"	<i>Istikmāl</i>	12/01/05	Indonesia Serempak, Saudi (H-1) Kontroversi
	Syawal	12/11/04 ⁻ 21:28	12/11/04	-3" 34"	<i>Istikmāl</i>	14/11/04	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	14/10/04 ⁻ 09:50	14/10/04	2" 55"	<i>Ru'yah</i>	15/10/04	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung DITERIMA
1424	Žulhijjah	22/01/04 ⁻ 04:06	21/01/04	-4" 51"	<i>Istikmāl</i>	23/01/04	Indonesia, Saudi Serempak
	Syawal	24/11/03 ⁻ 06:00	24/11/03	5" 31"	<i>Ru'yah</i>	25/11/03	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung, Dermaga Hak, Klender, Bangkalan DITERIMA

	Ramaḍān	25/10/03 19:52	25/10/03	-2" 12"	<i>Istikmāl</i>	27/10/03	Indonesia, Saudi Serempak
1423	Ẓulhijjah	01/02/03 ⁻ 17:50	01/02/03	0" 49"	<i>Istikmāl</i>	03/2/03	Muhammadiyah dan Saudi (H-1)
	Syawal	04/12/02 ⁻ 14:36	04/12/02	0" 31"	<i>Istikmāl</i>	06/12/02	Muhammadiyah dan Saudi (H-1)
	Ramaḍān	05/11/02 ⁻ 03:36	05/11/02	7" 02"	<i>Ru'yah</i>	06/11/02	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Klender dan Pelabuhan Ratu DITERIMA
	Ẓulhijjah	12/02/02 ⁻ 14:42	12/02/02	2"12"	<i>Ru'yah</i>	13/02/02	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung (hujan) DITERIMA
1422	Syawal	15/12/01 ⁻ 03:48	15/12/01	5" 48"	<i>Ru'yah</i>	16/12/01	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung, Malang, Pelabuhan Ratu DITERIMA
	Ramaḍān	15/11/01 13.42	15/11/01	1"09"	<i>Istikmāl</i>	17/11/01	Muhammadiyah dan Saudi (H-1)
	Ẓulhijjah	21/02/02 ⁻ 15:22	21/02/02	1" 51"	<i>Ru'yah</i>	24/02/01	Indonesia, Saudi Serempak MAIIMS+I Klaim <i>Ru'yah</i> Blitar DITERIMA
1421	Syawal	25/12/00 ⁻ 00:24	25/12/00	-4" 18"	<i>Istikmāl</i>	27/12/00	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	25/11/00 ⁻ 06:12	25/11/00	4" 24"	<i>Ru'yah</i>	27/11/00	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Klender DITERIMA
	Ẓulhijjah	06/03/00 ⁻ 12:18	06/01/00	3" 06"	<i>Imkān</i>	03/03/00	Indonesia, Saudi Serempak, NU (H-1)
1420	Syawal	07/01/00 ⁻ 01:16	06/01/00	-4" 59"	<i>Istikmāl</i>	04/01/00	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	08/12/99 05:34	07/12/99	-6" 36"	<i>Istikmāl</i>	09/12/99	Indonesia, Saudi Serempak
1419	Ẓulhijjah	18/03/99 01:50	18/03/99	-3" 41"	<i>Istikmāl</i>	19/03/99	Indonesia Serempak, Saudi

							(H-1)
	Syawal	17/01/99 22:48	17/01/99	-4" 11"	<i>Istikmāl</i>	19/01/99	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	19/12/98 05:44	19/12/98	-7" 17"	<i>Istikmāl</i>	20/12/98	Indonesia, Saudi Serempak
	Žulhijjah	28/02/98 10:16	28/02/98	3" 36"	<i>Imkān</i>	29/03/98	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
1418	Syawal	28/01/98 13:02	28/01/98	0" 18"	<i>Istikmāl</i>	30/01/98	Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung dan Ilmuan DITOLAK Muh, NU Jatim dan Saudi (H-1)
	Ramaḍān	29/12/97 23:58	29/12/97	-3" 16"	<i>Istikmāl</i>	31/11/98	Indonesia, Saudi Serempak
	Žulhijjah	07/04/97 18:04	07/04/97	-0" 35"	<i>Istikmāl</i>		Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
1417	Syawal	07/02/97 22:06	07/02/97	-0" 39"	<i>Istikmāl</i>		Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	09/01/97 11:26	09/01/97	5" 48"	<i>Ru'yah</i>		Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Manado, Rembang, Cakung DITERIMA
	Žulhijjah	18/04/96 05:50	18/04/96	4" 44"	<i>Imkān</i>		Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
1416	Syawal	19/02/96 06:32	19/02/96	2" 51"	<i>Ru'yah</i>		Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	20/01/96 19:52	20/01/96	-4" 01"	<i>Istikmāl</i>		Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Žulhijjah	30/04/95 00:08	30/04/95	6" 16"	<i>Imkān</i>	01/05/95	Indonesia, Saudi Serempak
1415	Syawal	01/03/95 06:32	01/03/95	-3" 43"	<i>Istikmāl</i>	03/03/95	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	31/01/95 05:50	31/01/95	2" 49"	<i>Ru'yah</i>	01/02/95	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung DITERIMA
1414	Žulhijjah	11/05/94 00:08	11/05/94	6" 14"	<i>Imkān</i>	12/05/94	Indonesia, Saudi Serempak

	Syawal	12/03/94 ⁻ 14:06	12/03/94	-1" 58"	<i>Istikmāl</i>	14/01/94	Indonesia Serempak, Saudi (H-1) Klaim Nambangan, NU Jatim (H-1)
	Ramaḍān	10/01/94 ⁻ 21:32	10/01/94	-4" 54"	<i>Istikmāl</i>	12/02/94	Indonesia, Saudi Serempak
1413	Žulhijjah	21/05/93 ⁻ 21:08	21/05/93	-3" 17"	<i>Istikmāl</i>	23/05/93	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Syawal	23/03/93 ⁻ 14:16	23/03/93	-2" 15"	<i>Istikmāl</i>	25/03/93	Indonesia Serempak, Saudi (H-2) Klaim <i>Ru'yah</i> Ujung Pangkah Ciresik, NU (H-1)
	Ramaḍān	21/02/93 ⁻ 20:06	21/02/93	-4" 19"	<i>Istikmāl</i>	23/02/93	Indonesia, Saudi Serempak
	Žulhijjah	01/06/92 ⁻ 10:58	01/06/92	1" 48"	<i>Istikmāl</i>	03/06/92	Indonesia Serempak, Saudi (H-1) Muhammadiyah
1412	Syawal	01/04/92 ⁻ 12:04	01/04/92	-1 17"	<i>Istikmāl</i>	05/04/92	Indonesia Serempak, Saudi (H-2) Klaim <i>Ru'yah</i> Jatim, NU (H-1)
	Ramaḍān	04/03/92 ⁻ 20:24	04/03/92	-4" 28"	<i>Istikmāl</i>	06/03/92	Indonesia Serempak, Saudi (H-2) (Tha disepakati kriteria MAIIMS)
	Žulhijjah	12/06/91 ⁻ 19:08	12/06/91	-2" 45"	<i>Istikmāl</i>	14/06/91	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
1411	Syawal	15/04/91 ⁻ 02:40	15/04/91	3" 35"	<i>Ru'yah</i>	16/04/91	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Pelabuhan Ratu, Cakung, Klender DITERIMA
	Ramaḍān	16/03/91 ⁻ 15:12	16/03/91	-2" 19"	<i>Istikmāl</i>	18/03/91	Indonesia, Saudi Serempak
	Žulhijjah	23/06/90 ⁻ 01:56	23/06/90	7" 22"	<i>Imkān</i>	24/06/90	Indonesia Serempak, Saudi (H-1) Tragedi Mina
1410	Syawal	25/04/90 ⁻ 11:27	25/04/90	-0" 22"	<i>Istikmāl</i>	27/04/90	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	27/03/90 ⁻ 00:50	27/03/90	3" 50"	<i>Imkān</i>	28/03/90	Indonesia, Saudi Serempak
1409	Žulhijjah	03/07/09 ⁻ 11:59	03/07/09	1" 30"	<i>Istikmāl</i>	05/07/89	Muhammadiyah dan Saudi

							(H-1)
	Syawal	06/05/09 ⁻ 18:48	06/05/09	8" 19"	<i>Imkān</i>	07/05/89	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Ramaḍān	06/04/09 ⁻ 10:33	06/04/09	0" 28"	<i>Istikmāl</i>	08/04/89	Muhammadiyah dan Saudi (H-1)
1408	Žulhijjah	14/07/08 ⁻ 11:59	14/07/08	4" 52"	<i>Imkān</i>	15/07/88	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
	Syawal	16/05/08 ⁻ 05:12	16/05/08	2" 59"	<i>Ru'yah</i>	17/05/88	Indonesia, Saudi Serempak Klaim <i>Ru'yah</i> Cakung dan Klender DITERIMA
	Ramaḍān	16/04/08 ⁻ 19:02	16/04/08	-3" 17"	<i>Istikmāl</i>	18/04/88	Indonesia, Saudi Serempak

Dari tabel 1 di atas bisa difahami bahwa antara NU dan Muhammadiyah hampir setiap tahun berbeda penetapan dalam menentukan awal bulan Qamariah dengan penetapan (*isbāt*) pemerintah RI. Fakta tersebut bisa dijumpai pada tahun-tahun berikut ini:

- 1) Pada tahun 2007 M/1428 H Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 12 Oktober 2007, 1 hari lebih awal dengan hasil *isbāt* pemerintah RI yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 13 Oktober 2007. Sedangkan dalam penetapan awal bulan *Ẓulhijjah* dan *Ramaḍān* Muhammadiyah sama dengan penetapan pemerintah. Berbeda dengan Muhammadiyah, NU untuk tahun 2007 ini serempak dengan penetapan pemerintah.

Kasus serupa pun terjadi lagi pada tahun 2003, dimana pemerintah RI menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 6 Desember 2002 dan *Ẓulhijjah* pada tanggal 3 Februari 2003 M/1 Syawal 1423 H, sedangkan Muhammadiyah mendahului 1 hari dari penetapan pemerintah, yaitu 1 Syawal jatuh pada tanggal 5 Desember 2002 dan *Ẓulhijjah* pada tanggal 4 Desember 2003. Namun dalam penetapan awal *Ramaḍān* sama dengan penetapan pemerintah.

Kemudian pada tahun 2002 M/1422 H, namun kali ini Muhammadiyah hanya berbeda penetapan pada awal bulan *Ramaḍān*nya saja, dimana Muhammadiyah 1 hari lebih awal dari penetapan pemerintah.

- 2) Penetapan pemerintah tentang awal bulan *Ẓulhijjah* tahun 1420 H/2000 M jatuh pada tanggal 3 Maret 2000, sedangkan NU pada tanggal 2 Maret 2000. Bulan *Ramaḍān* dan *Syawal* serempak dengan penetapan pemerintah.
- 3) Penetapan pemerintah tentang 1 *Syawal* 1418 H jatuh pada tanggal 30 Januari 1998, sedangkan NU Jawa Timur dan Muhammadiyah pada tanggal 29 Januari 1998. Bulan *Ramaḍān* dan *Syawal* serempak dengan penetapan pemerintah.
- 4) Penetapan pemerintah tentang 1 *Syawal* 1414 H jatuh pada tanggal 14 Januari 1994, sedangkan NU Jawa Timur pada tanggal 13 Januari 1994. Bulan *Ramaḍān* dan *Syawal* serempak. Dan kasus ini terulang lagi pada tahun 1413 H/1993 M. NU 1 hari lebih awal dari penetapan pemerintah.
- 5) Penetapan pemerintah tentang awal bulan *Ẓulhijjah* dan *Syawal* tahun 1412 H/1992 M yang jatuh pada tanggal 3 Juni 1992, dan *Syawal* pada tanggal 5 April 1992, sedangkan penetapan NU dan Muhammadiyah pada tanggal 2 Juni 1992 dan 1 *Syawal* pada tanggal 4 April 1992. Bulan *Ramaḍān* serempak dengan penetapan pemerintah.
- 6) Penetapan pemerintah tentang awal bulan *Ẓulhijjah* dan *Ramaḍān* tahun 1409 H/1989 M yang jatuh pada tanggal 5 Juli 1989, dan *Ramaḍān* pada tanggal 8 April 1989, sedangkan penetapan NU dan Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli 1989 dan *Ramaḍān* pada tanggal 7 April 1989. Bulan *Syawal* serempak dengan penetapan pemerintah.

Kemudian untuk tahun 1962-1987, hasil *isbāt* Pemerintah RI sebagaimana penulis teliti, hanya menemukan bukti penetapan 1 Ramaḍān dan 1 Syawal saja, sedangkan 1 Żulhijjah belum menemukan datanya.³¹

Tabel 2

Hasil Keputusan Menteri Agama RI

Tentang Penetapan 1 Ramaḍān 1381 – 1407 H / 1962 – 1987 M³²

No	Penetapan	Nomor SK	Jatuhnya 1 Ramaḍān
1	1 Ramaḍān 1381	6 Tahun 1962	Kamis, 6 Maret 1962
2	1 Ramaḍān 1382	7 Tahun 1963	Ahad, 27 Januari 1963
3	1 Ramaḍān 1383	3 Tahun 1964	Kamis, 16 Januari 1964
4	1 Ramaḍān 1384	1 Tahun 1965	Senin, 4 Januari 1965
5	1 Ramaḍān 1385	1 Tahun 1965	Jumat, 24 Desember 1965
6	1 Ramaḍān 1386	90 Tahun 1966	Selasa, 13 Desember 1966
7	1 Ramaḍān 1387	-	Selasa, 3 Desember 1967
8	1 Ramaḍān 1388	254 Tahun 1968	Jum'at, 22 November 1968
9	1 Ramaḍān 1389	160 Tahun 1969	Selasa, 11 November 1969
10	1 Ramaḍān 1390	264 Tahun 1970	Sabtu, 31 Oktober 1970
11	1 Ramaḍān 1391	62 Tahun 1971	Kamis, 21 Oktober 1971
12	1 Ramaḍān 1392	86 Tahun 1972	Senin, 9 Oktober 1972
13	1 Ramaḍān 1393	87 Tahun 1973	Jum'at, 28 September 1973
14	1 Ramaḍān 1394	60 Tahun 1974	Selasa, 17 September 1974
15	1 Ramaḍān 1395	42 Tahun 1975	Ahad, 7 September 1975
16	1 Ramaḍān 1396	44 Tahun 1976	Jum'at, 27 Agustus 1976
17	1 Ramaḍān 1397	49 Tahun 1977	Selasa, 16 Agustus 1977
18	1 Ramaḍān 1398	72 Tahun 1978	Sabtu, 5 Agustus 1978
19	1 Ramaḍān 1399	59 Tahun 1979	Rabu, 25 Juli 1979
20	1 Ramaḍān 1400	40 Tahun 1980	Senin, 14 Juli 1980
21	1 Ramaḍān 1401	54 Tahun 1981	Jum'at, 3 Juli 1981
22	1 Ramaḍān 1402	55 Tahun 1982	Rabu, Juni 1982
23	1 Ramaḍān 1403	41 Tahun 1983	Ahad, 12 Juni 1983
24	1 Ramaḍān 1404	40 Tahun 1984	Jum'at, 1 Juni 1984
25	1 Ramaḍān 1405	-	Selasa, 21 Mei 1985
26	1 Ramaḍān 1406	155 Tahun 1986	Sabtu, 10 Mei 1986
27	1 Ramaḍān 1407	70 Tahun 1987	Rabu, 29 April 1987

³¹ *Ibid.*, 5.

³² *Ibid.*, 5-6.

Dari tabel 2 di atas tidak ditemukan perbedaan penetapan dalam penentuan awal bulan Ramaḍān antara NU, Muhammadiyah dan juga pemerintah, dikarenakan memang data yang penulis peroleh hanya mencantumkan penentuan awal bulan Ramaḍān versi pemerintah saja, tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya perbedaan penetapan. Namun demikian dari tabel 2 di atas bisa diambil kesimpulan bahwa sejak tahun 1381 – 1407 H / 1962 – 1987 M *isbāt* pemerintah RI sudah diberlakukan.

Tabel 3

Hasil Keputusan Menteri Agama RI
Tentang Penetapan 1 Syawal 1381 – 1407 H / 1962 – 1987 M³³

No	Penetapan	Nomor SK	Jatuhnya 1 Syawal
1	1 Syawal 1381	6 Tahun 1962	Kamis, 6 Maret 1962
2	1 Syawal 1382	-	Senin, 25 Februari 1963
3	1 Syawal 1383	-	Sabtu, 15 Februari 1964
4	1 Syawal 1384	-	Rabu, 3 Februari 1965
5	1 Syawal 1385	-	Jumat, 23 Januari 1966
6	1 Syawal 1386	Tanpa nomor	Kamis, 12 Januari 1966
7	1 Syawal 1387	-	Senin, 1 Januari 1968
8	1 Syawal 1388	267 Tahun 1968	Sabtu, 21 Desember 1968
9	1 Syawal 1389	-	Kamis, 11 Desember 1969
10	1 Syawal 1390	-	Senin, 30 November 1970
11	1 Syawal 1391	-	Jum'at, 19 November 1971
12	1 Syawal 1392	97 Tahun 1972	Selasa, 7 November 1972
13	1 Syawal 1393	96 Tahun 1973	Sabtu, 27 Oktober 1973
14	1 Syawal 1394	66 Tahun 1974	Kamis, 17 Oktober 1974
15	1 Syawal 1395	48 Tahun 1975	Senin, 6 Oktober 1975
16	1 Syawal 1396	-	Sabtu, 25 September 1976
17	1 Syawal 1397	-	Kamis, 15 September 1977
18	1 Syawal 1398	-	Senin, 4 September 1978
19	1 Syawal 1399	64 Tahun 1979	Jum'at, 24 Agustus 1979
20	1 Syawal 1400	47 Tahun 1980	Selasa, 12 Agustus 1980
21	1 Syawal 1401	66 Tahun 1981	Sabtu, 1 Agustus 1981
22	1 Syawal 1402	68 Tahun 1982	Kamis, 22 Juli 1982
23	1 Syawal 1403	-	Selasa, 12 Juli 1983
24	1 Syawal 1404	53 Tahun 1984	Sabtu, 30 Juni 1984
25	1 Syawal 1405	-	Kamis, 20 Juni 1985
26	1 Syawal 1406	163 Tahun 1986	Senin, 9 Juni 1986
27	1 Syawal 1407	81 Tahun 1987	Jum'at, 29 Mei 1987

Sama halnya dengan tabel 2, dari tabel 3 di atas pun tidak ditemukan perbedaan penetapan dalam penentuan awal bulan Syawal antara NU, Muhammadiyah dan juga pemerintah, dikarenakan memang data yang

³³ *Ibid*, 6-7.

penulis peroleh hanya mencantumkan penentuan awal bulan Syawal versi pemerintah saja, tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya perbedaan penetapan. Namun demikian dari tabel 3 di atas bisa diambil kesimpulan bahwa sejak tahun 1381 – 1407 H / 1962 – 1987 M, *isbāt* pemerintah RI sudah diberlakukan.

B. Metode yang Digunakan dalam *Isbāt* Pemerintah RI Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariah

1. Konsep *Hilāl*

Terbitnya hilal sebagai dasar penentuan awal bulan Qomariyah telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dengan sistem *ru'yah* (observasi) dalam berbagai hadisnya tentang penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ³⁴

“Dari Ibnu ‘Umar berkata: Rasūlullah saw bersabda: satu bulan hanya dua puluh sembilan hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan (hilāl) dan jangan kamu berbuka sebelum melihatnya, dan jika tertutup awan, maka perkirakanlah.”

Sejalan dengan *hadīs* di atas, surat al-Baqarah: 189 pun dengan gamblang menyinggung konsep tentang *hilāl*, yang disebutkan dengan kata jamak *الْأَهْلَةُ*, berikut potongan ayatnya:

³⁴ Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 481.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³⁵

Artinya:

“mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Al-Baqarah:189)”

Kalimat melihat *hilāl* dalam *ḥadīs* dan potongan ayat di atas mencerminkan pengertian atau konsep yang sudah umum bahwa *hilāl* itu

berkenaan dengan “sesuatu yang tampak” (شَيْءٌ مَرْتَبِيٌّ) dan berhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dengan bulan (*qamar*). Dalam bahasa arab *hilāl* berarti عُرَّةُ الْقَمَرِ (awal

penampakan bulan). Bulan dinamai *hilāl* pada dua, tiga atau bahkan sampai tujuh malam dari awal bulan (*syahr*), begitu pula pada dua malam dari akhir bulan, atau pada malam ke-26 atau ke-27. Ketika penampakan bulan sudah penuh (الْقَمَرُ الْمَمْلُوءُ), maka ia disebut *badr*. Diluar keadaan-keadaan seperti itu, bulan dinamakan *qamar*.³⁶

³⁵ DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.), 153.

³⁶ Abd. Salam Nawawi, *Tradisi Fikih NU; Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam*, Disertasi S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya, 138.

2. Cara Menentukan Kemunculan *Hilāl*

Kementerian Agama RI menetapkan kriteria penampakan *hilāl* dengan prinsip menggabungkan metode yang berkembang, yaitu *hisāb* dan *ru'yah* yang mengambil keputusan *hilāl* dapat dilihat kurang dari 2' apabila ditinjau dari segi ilmu pengetahuan kemungkinan terjadinya akan sangat kecil sekali. Begitu juga dengan negara-negara yang sudah menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Kementerian Agama hanya berdasarkan karena banyaknya pengalaman *hisāb haqīqi* di Indonesia yang menganggap bahwa setiap *hilāl* yang berada di atas ufuk pasti dapat dilihat.³⁷

Adapun perbedaan kriteria penampakan *hilāl* sangat berpengaruh terhadap satu daerah dengan daerah lainnya, karena tidak semua tempat berada dalam posisi yang sama. Hal ini terjadi juga karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penampakan *hilāl*, diantaranya:

- a. Kemampuan mata manusia dalam melihat suatu objek tidak akan sama walaupun untuk mata yang normal. Perbedaan ini akan sangat kecil sekali, tetapi untuk memperkecil pengaruh faktor kemampuan mata manusia pada waktu melihat *hilāl*, hendaklah dilakukan oleh beberapa orang.
- b. Kecenderungan langit senja juga akan mempengaruhi pengamatan *hilāl*, karena kondisi lain yang redup akan memberikan kesempatan kepada

³⁷Setyo Purwadi, "Mengapa Idul Fitri Bisa Berbeda: Telaah Terhadap Pemikiran Ahli *Ru'yah* dan Ahli *Hisāb*", *Jurnal Hukama* Vol. 1, (Januari 2007), 103.

mata manusia untuk melihat *hilāl* dengan baik. Kondisi langit yang redup itu terjadi pada saat matahari terbenam, karena itu untuk dapat melihat *hilāl* yang baik diperlukan pengetahuan cara penentuan waktu matahari terbenam.

- c. Paralaks horizon yang disebabkan karena adanya acuan dalam penentuan posisi benda-benda langit yang menggunakan pusat bumi sebagai acuannya dan posisi pengamatan yang ada di permukaan bumi. Perbedaan acuan antar pusat bumi ini tidak berpengaruh dalam pengamatan benda-benda langit yang jauh seperti bintang-bintang, tetapi untuk pengamatan benda-benda langit yang dekat seperti matahari dan bulan efek paralaks horizon ini sangat berpengaruh sekali. Sebagai contoh koreksi paralaks horizon untuk matahari sekitar 9", tetapi untuk bulan bisa mencapai 1'.³⁸

3. Akibat Hukum Kemunculan *Hilāl*

Menurut al-Lais secara garis besar pendapat fukaha' dalam permasalahan ini terbelah menjadi dua aliran, yaitu³⁹:

a. Pendapat Jumhur Ulama'

Jumhur ulama' berpendapat seluruh kawasan di muka bumi adalah satu *maṭla'* (*ittifāq al-maṭla'*)⁴⁰. Apabila penduduk suatu negeri telah melihat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ 'Abdurrahman Al Jāziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), diterjemahkan oleh Husni Syawie, (Jakarta: PT. Lentera Basri Tama, 1998), 35.



bulan, wajiblah puasa atas semua negeri. Jika adanya *hilāl* telah diakui di suatu wilayah, maka wajib puasa atas seluruh penduduk wilayah tersebut, baik yang dekat dengan tempat terlihat tersebut maupun yang jauh, jika mereka telah menerima berita tersebut lewat jalan yang mewajibkan puasa. Demikian menurut ulama' Hanafi, Maliki dan Hambali.

b. Pendapat segolongan kecil ulama'

Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas fukaha' Syafi'iyah yang menyatakan bahwa apabila *hilāl* sudah terukyat di suatu negeri, tetapi tidak terukyat di negeri lain, maka jika negeri-negeri tersebut saling berdekatan dihukumi sebagai satu negeri, karena itu wajib atas penduduk negeri yang tidak merukyat *hilāl* mengikuti *ru'yah hilāl* penduduk negeri lainnya. Tetapi jika berjauhan, maka *ru'yah* negeri-negeri itu tidak boleh saling mengikuti (*ikhtilāf al-matla'*). Dekat ditentukan oleh kesamaan *matla'*, dimana jarak keduanya lebih sedikit dari 24 farsakh.

Pemerintah RI sendiri yang terwakili oleh MUI lewat fatwanya menyimpulkan dua hal, yaitu: *pertama*, pendapat jumhur ulama (yang mengabaikan *matla'*) hendaknya dipedomani dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan Syawal, sehingga *ru'yah* yang terjadi di negara Islam mana pun dapat diberlakukan secara internasional untuk negara-negara Islam yang lain.

⁴⁰ Istilah *ikhtilāf al-matla'* bisa ditemukan di dalam Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1426-1427H/2006M), 262.

Hanya saja untuk ini diperlukan kesempatan membentuk lembaga yang berstatus Qadi internasional yang dipatuhi oleh seluruh negara Islam. Sebelum lembaga tersebut bisa diwujudkan, maka yang berlaku adalah ketetapan Pemerintah RI masing-masing negara. *Kedua*, khusus untuk penetapan *Zulhijjah* berlaku *maṭla'* masing-masing negara. Dengan demikian Indonesia dalam beridul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *maṭla'*.⁴¹

4. Yang berwenang Menentukan Awal Bulan Qamariah

Sebagai pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, Pemerintah RI Indonesia yang dalam hal ini diwakili Kementerian Agama Republik Indonesia berhak mengambil keputusan dalam penentuan awal bulan Qamariah (*Ramaḍān*, *Syawal*, dan *Zulhijjah*), karena masih saja terjadi perbedaan dalam penetapan bulan tersebut, baik antara Pemerintah RI dengan satu kelompok masyarakat ataupun antar kalangan masyarakat itu sendiri. Pemerintah RI berupaya untuk selalu bersikap akomodatif terhadap semua pendapat dan mencari alternatif lain menyelesaikan pendapat-pendapat yang berkembang.

⁴¹ Abdussommod Buchori, *et al. 101 Masalah Hukum Islam Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (MUI Jawa Timur bekerja sama dengan Pustaka Dai Muda, 2003), 43.

Kementrian Agama yang bertugas menyelesaikan masalah ini membentuk sidang *isbāt* yang dipimpin oleh Menteri Agama⁴² dan dihadiri undangan, baik perorangan maupun utusan dari satu organisasi. Sidang *isbāt* ini menetapkan satu keputusan yang diambil dari data-data yang dilaporkan oleh berbagai pihak (baik *ru'yah* maupun *hisāb*) yang menghasilkan keputusan, dan kemudian keputusan itu diumumkan oleh Menteri Agama pada saat itu juga.

Keputusan yang diambil Pemerintah RI tidak jarang masih saja ditentang oleh kalangan yang merasa tidak seuai dengan pendapatnya tanpa mengingat bahwa kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penetapan awal bulan Qamariah (Ramaḍan, Syawal, dan Dzuhijjah) ada di tangan Kementrian Agama. Sehingga kelompok tersebut tidak mengikuti hasil keputusan Pemerintah RI, melainkan bisa saja mereka melaksanakan puasa, idul fitri, atau idul adha sesuai pendapatnya.

Dari pengalaman *isbāt* yang telah lalu, diperoleh suatu gambaran kebijakan sebagai berikut:

4. Sidang *isbāt* selalu memperhatikan hasil *ru'yah* dan *hisāb*. Oleh karena itu keputusan-keputusan dari sidang yang lalu sesuai dengan laporan hasil *ru'yah* dan *hisāb*.

⁴² Dalam pelaksanaan sidang, kadang tidak langsung dipimpin oleh Menteri Agama, tetapi Dirjen Bimas Islam, sebagai contoh sidang *isbāt* penentuan awal Zulhijjah 1431 H tidak dipimpin langsung oleh Menteri Agama, ini dikarenakan Menteri Agama sedang tugas menjadi Amirul Hajj di Makkah.

5. Jika menurut *ḥisāb* yang akurat *hilāl* masih di bawah ufuk kemudian ada yang melaporkan telah melihat *hilāl*, maka laporan tersebut ditolak.
6. Jika menurut *ḥisāb* yang akurat posisi *hilāl* untuk seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, namun tidak ada satu laporan pun yang menyatakan berhasil melihat *hilāl*, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan *ḥisāb*.
7. Jika wilayah Indonesia terpotong oleh garis ketinggian *hilāl* nol (0) derajat - pada sebelah barat garis tersebut *hilāl* sudah di atas ufuk dan sebelah timurnya masih di bawah ufuk, maka yang dijadikan pedoman adalah hasil *ru'yah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Urusan

Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Mudzakkir,⁴³ bahwa dalam *māẓhab* Syafi'i mensyaratkan bahwa penetapan (*isbāt*) awal bulan Qamariah khususnya awal Ramaḍān, Syawal dan Żulhijjah harus dilakukan Pemerintah RI atau *qāḍi*. Apabila Pemerintah RI telah menetapkan, maka seluruh umat Islam wajib mengikuti dan mentaati melaksanakannya. Sedang *māẓhab* Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak mensyaratkan harus ditetapkan oleh pemerintah atau *qāḍi*. Tetapi jika Pemerintah RI telah menetapkan, dengan

⁴³ Mudzakkir, "Pedoman Hisab *Ru'yat* Departemen Agama RI," makalah ini disampaikan pada *Acara Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Ru'yah Nahdlatul Ulama*, diselenggarakan oleh Lajnah Falakiyah PBNU, Semarang, 17-23 Desember 2006, 6-7.

cara apapun (*ru'yah* atau *hisāb*), maka umat Islam wajib mengikuti dan mentaatinya.

Lebih lanjut Mudzakkir menjelaskan ada beberapa keuntungan dengan adanya sidang *qāḍi* Pemerintah RI, antara lain:

1. *Isbāt* diperlukan untuk mendapatkan keabsahan.
2. *Isbāt* diperlukan untuk mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan.
3. *Isbāt* diperlukan untuk penyatuan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Semuanya wajib mengikuti dan mentaati, serta tidak boleh lagi terjadi adanya silang pendapat demi tegaknya ukhuwah Islamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Metode *Imkān al-Ru'yah* Sebagai Payung Pemersatu Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariah

Sebenarnya selain pertimbangan *ru'yah* dan *hisāb*, Pemerintah RI berusaha mengakomodir semua pihak, yakni dengan mendekatkan atau menjembatani dua *mazhab* besar tersebut, yaitu dengan adanya *imkān al-ru'yah*. Sehingga *mazhab imkān al-ru'yah* muncul sebagai upaya bagaimana hasil *hisāb*-nya dapat sesuai dengan *ru'yah* dan *ru'yah*-nya tepat sasaran sesuai dengan data *hisāb*-nya, mengingat objek sasarannya sama, yakni *hilāl*. Hanya saja kriteria *imkān al-ru'yah* masih belum ada kejelasan dan kesepakatan.

Berdasarkan lembaran sejarah pemikiran *hisāb ru'yah*, ternyata embrio (kalau tidak dikatakan munculnya *mazhab* secara utuh) *mazhab imkān al-*

ru'yah, sudah lama diperbincangkan dikalangan ulama fiqh, bahkan yang memeloporinya, seperti: al-Qalyubi, Ibnu Qāsim al-‘Ubbadi, al-Syarwānī, dan Al-Ṣubḥi. Hanya saja, kriteria *imkān al-ru'yah*-nya belum ada kesepakatan atau belum ada kriteria yang dapat diterima semua pihak.⁴⁴

Oleh karena itu, melihat pentingnya kriteria *imkān al-ru'yah* tersebut, Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Agama –sekarang Kementerian Agama—merasa perlu memberikan solusi alternatif dengan menawarkan kriteria yang dapat diterima semua pihak, apalagi didorong oleh Keputusan Musyawarah Kerja *Ḥisāb Ru'yah* tahun 1998/1998 di Ciawi Bogor yang meminta diadakan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang *imkān al-ru'yah*. Oleh karena itu, pada bulan Maret 1998 dilakukan pertemuan dan musyawarah ulama ahli *ḥisāb* dari berbagai ormas Islam, yang juga diikuti oleh ahli astronomi dan instansi terkait. Pertemuan tersebut diantaranya yang menghasilkan keputusan:

1. Penentuan awal bulan Qamariah didasarkan pada *imkān al-ru'yah*, sekalipun tidak ada laporan *ru'yah al-hilāl*.
2. *Imkān al-ru'yah* dimaksud didasarkan pada tinggi *hilāl* 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat *ijtima' ḥisāb* saat matahari terbenam;
3. Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem *ḥisāb haqīqi* kontemporer;

⁴⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Ḥisāb Ru'yah*, 136-137.

4. Laporan *ru'yah al-hilāl* yang kurang dari dua derajat dapat ditolak.⁴⁵

Keputusan tersebut bisa dikatakan hampir sama dengan apa yang dihasilkan oleh Komite Penyelarasan *Ru'yah* dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Ini terbukti dengan adanya salah satu hasil keputusannya yang menyatakan: “*Had* atau batas minimal ketinggian yang dijadikan pedoman *imkān al-ru'yah* dan diterima oleh ahli *ḥisāb falaki syar'i* di Indonesia serta negara-negara MABIMS adalah dua derajat dan umur bulan minimal delapan jam dari saat *ijtima'*, perlu dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang sistematis dan ilmiah.”⁴⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁵ *Ibid.*, 141.

⁴⁶ *Ibid.*, 142.

BAB III

PANDANGAN PARA TOKOH STRUKTURAL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH (PW) JAWA TIMUR TERHADAP *İSBAT* PEMERINTAH RI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH

A. Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Terhadap *İsbāt* Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

digilib.uinsby.ac.id Untuk mempermudah penulisan, penulis akan mengklarifikasi pandangan para tokoh struktural PWNU Jawa Timur terhadap beberapa point sebagai berikut: terminologi *İsbāt* pemerintah RI, landasan hukum, hukum mengikutinya, syarat-syarat *İsbāt* pemerintah RI, fungsi dan kedudukan *İsbāt* Pemerintah RI, implikasi hukum yang ditimbulkan dengan adanya *İsbāt* pemerintah RI.

Dengan tidak bermaksud mengecilkan arti dari para tokoh PWNU lainnya, penting dikemukakan bahwa deskripsi berikut ini hanya akan menyajikan pandangan dari beberapa tokoh PWNU tertentu saja, yaitu mereka yang menurut “rekomenđasi” memenuhi kualifikasi, memiliki konsen dalam penelitian ini serta yang mempunyai waktu luang untuk penulis wawancarai.

Yang kesemuanya menduduki jabatan struktural pada periode 2008-2013.

Mereka yang terpilih sesuai kualifikasi diatas adalah:

1. Drs. K.H. Syafruddin Syarif

Dilahirkan di Jakarta 15 1966. Menempuh pendidikan formal di SD Islam At Taufiq wal Hidāyah Kelurahan Galur Cempaka Putih Jakarta Pusat, tamat pada tahun 1979. Kemudian melanjutkan studinya ditingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Madrasah Hidāyatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri, tamat pada tahun 1985. Setamat dari Pondok Pesantren Lirboyo, Drs. K.H. Syafruddin Syarif mulai mengamalkan ilmunya, yakni mengajar di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, yang diasuh oleh K.H. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH., MM yang sekarang ini beliau menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur. Selain mengajar, dia sambil menempuh studi S1 di STAI Zainul Hasan, tamat pada tahun 1991.

Selain itu, dia pernah menimba ilmu, *ngaji* khataman kitab *Bukhārī* kepada *kyai* Jamal Pethuk Kediri, *ngaji* kitab *Mīzan Kubro* selama 10 hari di sebuah pondok yang diasuh oleh *kyai* Dimyati Kaliwungu Kendal Jawa Tengah, tetapi belum sampai *ḥatam*, dia diminta untuk meramaikan pengajian *ramadānan* dirumahnya.

Sebagai pengalaman organisasinya, Drs. K.H. Syafruddin Syarif pernah menjadi Wakil Senat Mahasiswa STAI Zainul Hasan, Wakil

Sekretaris *Lajnah Bahsul Masā'il* PWNU Jawa Timur, Wakil Kātib PWNU Jawa Timur, dan sekarang dia menjabat sebagai Ketua Kātib PWNU Jawa Timur periode 2008-2013.¹

Drs. K.H. Syafruddin Syarif mendefinisikan *isbāt* pemerintah RI sebagai penetapan pemerintah RI tentang tanggal 1 bulan Hijriah, seperti tanggal 1 Ramaḍān, 1 Syawal yang diekpost keluar dan diadakan sidang dengan beberapa tokoh. Dalam mendefinisikan *isbāt* ini dia menggunakan kaidah fikhiyah, *حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ* jadi dalam pandangannya, pemerintah RI mempunyai wewenang untuk menetapkan penetapan tanggal 1 bulan Hijriah, terutama ketika terjadi *khilāf* atau perbedaan. Dia mencontohkan ketika ada perbedaan pendapat yang satu sudah melihat *hilāl*, sedang ditempat lain belum, mungkin dikarenakan mendung, maka dalam hal ini ketetapan pemerintah RI berlaku untuk semua kalangan, baik bagi kalangan yang berada ditempat dimana *hilāl* sudah bisa dilihat maupun ditempat yang *hilāl* belum bisa dilihat. Padahal semestinya, dalam *hadīs* dijelaskan bagi daerah yang tidak melihat *hilāl*, maka harus menyempurnakan (*istikmāl*) bilangan bulan Sya'bān menjadi 30 hari.

Landasan hukum yang dia gunakan dalam pandangannya terhadap *isbāt* pemerintah RI adalah kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* dan *حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ* kaidah ini pun hanya bisa diterapkan manakala *isbāt*

¹ Syafruddin Syarif, *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2011.

pemerintah RI telah memenuhi syarat, yakni khusus untuk NU ketika pemerintah RI mengambil keputusan dalam sidang *isbāt*-nya dengan berdasarkan *ru'yah*, *hisāb* hanya sebatas penunjang saja, maka warga NU wajib mengikuti ketetapan pemerintah RI tersebut. Sebab menurut beliau, *hilāl* bisa ditetapkan hanya dengan *ru'yah*. Dan ketika tidak berdasarkan *ru'yah*, maka warga NU tidak wajib mengikutinya. Ini dikarenakan menurut pandangan beliau, ketika pemerintah RI memutuskan tidak berdasarkan *ru'yah*, keputusannya salah, oleh karenanya tidak wajib untuk diikuti, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Pandangannya tercermin dalam penegasan berikut: “Ketika dia mengambil keputusan berdasar *hisāb* saja dan bertentangan dengan *ru'yah*, maka pemerintah RI kita nyatakan salah dalam hal ini, maka kita tidak wajib mengikuti pemerintah RI yang salah, *gitu*.”²

Dalam kondisi seperti ini, NU berhak *ikhbār*. Sebagaimana yang beliau katakan: “Jadi kalau dari kami, dari ormas NU, kita harus mengikuti pemerintah RI, syaratnya selama pemerintah RI itu mengambil keputusan itu berdasarkan *ru'yah*.”³

Dia juga menambahkan, ketika keputusan pemerintah RI sudah memenuhi syarat, maka sebagai implikasi hukumnya masyarakat Indonesia seluruhnya wajib mengikutinya. Di Indonesia sendiri ini belum sepenuhnya

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

berjalan dengan baik, salah satunya dikarenakan pemerintah RI masih memberikan toleransi untuk menghindari kerusuhan-kerusuhan yang akan terjadi jika dipaksakan untuk ikut dengannya. Sebagai implikasinya, jika tidak mengikuti ketetapan pemerintah RI, misal pemerintah RI memutuskan sudah lebaran, sedang masyarakat masih puasa, maka puasanya haram.

Berkaitan dengan fungsi *isbāt* pemerintah RI manakala sudah memenuhi syarat, fungsinya sangat penting sekali. *Saking* besarnya fungsi tersebut, Drs. Syafruddin Syarif menempatkan kedudukan *isbāt* dalam urutan pertama dibanding keputusan atau penetapan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. K.H. Abdurrahman Navis, Lc

K.H. Abdurrahman Navis, Lc dilahirkan di sebuah desa di kabupaten Sampang Madura pada tanggal 19 Mei 1963. Dia menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pondok Pesantren al-Ihsan Jarangoan Sampang dan tamat pada tahun 1977. Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dia tempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sidogiri Pasuruan dan tamat pada tahun 1980. Setelah itu, dia melanjutkan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Dar al-Rahman Jakarta dan selesai pada tahun 1984. Dua Pondok Pesantren inilah yang menjadikan pola pikirnya mulai terasah dengan baik. Dia juga banyak memperdalam ilmu pengetahuan dan Bahasa Arab di LIPIA Jakarta. Selama di LIPIA dia tergolong mahasiswa yang

cerdas, hingga akhirnya dia lulus dengan predikat *mumtāz* (istimewa) dan berhak mendapatkan beasiswa untuk studi agama di Universitas Imām Muhammad bin Su’ūd Riyāḍ selama 3 tahun, dan mendapat gelar *Licence* (Lc) pada tahun 1989. Selanjutnya, dia melanjutkan S2 di Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang dan mendapatkan gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) pada tahun 2007.

Saat ini dia mengasuh sebuah Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya, dan mengajar di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di NU K.H. Abdurrahman Navis pernah menduduki Wakil Rais Syuriyah PCNU Surabaya sekaligus merangkap sebagai Sekretaris *Lajnah Bahsul Masail* NU Jawa Timur periode 2002-2007. Pada tahun 2007 sampai sekarang dia menjabat Wakil Kātib PWNU Jawa Timur. Selain di NU, dia pernah menjadi anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.

Isbāt pemerintah RI menurut Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Sencaki Surabaya ini adalah sebuah implementasi dan pelaksanaan dari kaidah *fiqh* إِفْتِضَاءُ الْحَاكِمِ الزَّامُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa acuan yang digunakan oleh pemerintah RI dalam melakukan *isbāt* awal bulan Qamariah adalah *sunnah* atau perbuatan Nabi. Ketika itu, Nabi disamping sebagai Rasulullāh, juga sebagai kepala pemerintah RI. Sama halnya dalam urusan ‘*ubūdiyyah*

seperti penentuan awal bulan Qamariah, Nabi-lah yang berwenang untuk menetapkannya. Sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Ya wewenang itu, acuannya kepada *ru'yah* *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ* *hisāb* sebagai penunjang untuk *ru'yah*, acuannya *sunnah*, ya perbuatan Rasūlullāh itu sendiri, dalam posisinya sebagai kepala negara, pemerintah RI disamping juga beliau sebagai Nabi tentunya yang menentukan penentuan 1 Syāwal, Ramāḍan melalui *ru'yah*, dalil itu kan tidak harus jauh, tapi perbuatan itu lebih kuat.⁴

Mengenai hukum mengikuti *isbāt* pemerintah RI, menurut Abdurrahman tidak ada dalil yang mengatakan bahwa *isbāt* harus diikuti, tapi di zaman Nabi ketika beliau *isbāt*, semuanya mengikuti. Menurutnya, perbedaan di Indonesia itu lebih kepada konteks wacana ilmiah. Apalagi kemudian pengakuan terhadap pemerintah RI itu sendiri juga berbeda. Tapi dalam konteks ke-NU-an, pemerintah RI diakui sebagai *waliyyul amri darūriy bi as-syaukah*, artinya pemimpin yang dalam kondisi darurat bersyarat, tidak mutlak. Tapi dalam konteks yang diperlukan, maka wajib ditaati. Abdurrahman setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa ketika *isbāt* yang dilakukan telah memenuhi syarat, yaitu pemerintah RI sudah mendapatkan *ikhbār* dari seseorang yang dipercaya melihat bulan, maka wajib untuk diikuti. Dalam hal ini, dia juga menekankan pada metode yang digunakan oleh pemerintah RI harus dengan *ru'yah*. Jika tidak menggunakan *ru'yah*, maka tidak wajib untuk diikuti. Sebagai implikasinya, ketika *isbāt* yang dilakukan oleh pemerintah RI telah

⁴ Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011.

memenuhi syarat, namun tidak diikuti oleh rakyat Indonesia, maka puasa yang dilakukan tidak sah. Selain itu juga, implikasi terhadap pembayaran zakat dan pelaksanaan shalat Id. Ringkasnya menurut beliau, ada dua dampak yang ditimbulkan dari *isbāt* pemerintah RI, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataannya berikut ini: “(1) masalah sikap masyarakat yang bingung dengan perbedaan itu. (2) implikasi hukum, baik itu menyangkut pembayaran zakāt fiṭrah, pelaksanaan salat id, kemudian pelaksanaan puasa, ya banyak implikasi hukumnya itu.”⁵

Mengacu kepada fungsi dan kedudukan *isbāt* pemerintah RI itu sendiri, lebih lanjut Abdurrahman Navis mengatakan fungsi *isbāt* sangat kuat, hanya tingkat ketaatannya yang berbeda. Sedang kedudukannya

dalam hukum Islam sejalan dengan kaidah *إِقْتِضَاءُ الْحَاكِمِ الزَّامُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ*.

B. Pandangan Para Tokoh Struktural Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap *Isbāt* Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Sama halnya dengan pandangan para tokoh struktural NU, pandangan para tokoh struktural PW Muhammadiyah pun diklarifikasikan ke dalam beberapa poin, yaitu terminologi *isbāt* pemerintah RI, landasan hukum, hukum mengikutinya, syarat-syarat *isbāt* pemerintah RI, fungsi dan kedudukan *isbāt*

⁵ Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011.

pemerintah RI, implikasi hukum yang ditimbulkan dengan adanya *isbāt* pemerintah RI.

Dan dengan tidak bermaksud mengecilkan arti dari para tokoh PW Muhammadiyah lainnya, penting dikemukakan bahwa deskripsi berikut ini hanya akan menyajikan pandangan dari beberapa tokoh PWM tertentu saja, yaitu mereka yang menurut “rekomendasi” memenuhi kualifikasi, memiliki konsen dalam penelitian ini serta yang mempunyai waktu luang untuk penulis wawancara. Yang kesemuanya menduduki jabatan struktural pada periode 2010-2015. Mereka yang terpilih sesuai kualifikasi diatas adalah:

1. K.H. Muammal Hamidy, Lc

Dilahirkan di desa Sedayu Lawas Lamongan pada tanggal 1

September 1940, sosok tokoh PWM ini memulai pendidikan formalnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sedayu Lawas Lamongan, tamat pada tahun 1955, melanjutkan jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Tebuireng Jombang, tamat pada tahun 1958, kemudian Madrasah Aliyah di MA PERSIS Bangil Pasuruan, tamat pada tahun 1963. Setelah itu, beliau studi di Perguruan Tinggi Madinah Al Munawwarah untuk menyelesaikan jenjang S1 dan mendapat gelar *Licenc* (Lc).

Dalam pengalaman organisasinya, suami dari Hj. Zainab ini pernah menjadi Ketua PCM Bangil, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jatim, Wakil Ketua PWM Jatim periode 2000-2010, Wakil Ketua MUI Jatim

periode 2000-2005, Anggota Dewan Pakar ICMI periode 2000-2005. Dalam kesehariannya, beliau mempunyai kesibukan tulis-menulis dan mengajar serta dakwah. Saat ini dia tercatat Dosen *Ma'had lil fiqh wad Da'wah* Bangil. Beberapa karya tulis yang sudah beliau torehkan antara lain: *Tarjamah Naylul Awtar*, *Tarjamah Syarh Riyāḍ as-sālihīn*, Tanda-tanda *Husnul Khātimah*, Do'a dan Zikir, Tuntutan Shalat Praktis, dan lain-lain. Buku yang sedang beliau selesaikan dan hampir diterbitkan oleh penerbit Bina Ilmu Surabaya saat ini adalah *Beragam Do'a Mustajābah*.⁶

Muammal mendefinisikan *isbāt* sebagai suatu penetapan yang dilakukan oleh pemerintah RI setelah mendengar adanya *ru'yah* dari tim, jika diketahui adanya *hilāl*, maka ditetapkan, jika ternyata *hilāl* belum tampak, maka pemerintah RI tidak berhak mengeluarkan *isbāt*. Acuan yang digunakan oleh pemerintah RI dalam hal ini adalah bahwa secara yuridis formal pemerintah RI, dalam hal ini Kementrian Agama berwenang untuk mengurus bidang keagamaan. Dan sebagai dasar *syar'i*, adalah perbuatan Rasulullah ketika beliau mendapat laporan dari sahabat yang melakukan *ru'yah*, kemudian Nabi menyuruh untuk diumumkan.⁷

Dalam persyaratan *isbāt*, Muammal berpendapat bahwa *isbāt* harus dilakukan oleh sebuah tim yang telah ditunjuk oleh pemerintah RI, yakni

⁶ Uswah, edisi MPA 297/Juni 2011, 34-35.

⁷ Muammal Hamidy, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juli 2011.

Badan Hisab Rukyah, yang dikoordinir oleh Kementrian Agama. bukan sembarang orang. Dalam hal ini Kementrian Agama hanya sebatas koordinator atau pelayan saja dalam urusan ini. Bukan sebagai *hakim*. Oleh karenanya, *isbāt* pemerintah RI, menurut beliau tidak bersifat mengikat dan tidak wajib untuk diikuti. Dan kedudukannnya hanya terbatas pada fungsi *isbāt* itu sendiri, yakni menetralsir *ikhtilāf* yang ada. Karena pemerintah RI tidak berhak diikuti dalam urusan agama, dia hanya berhak diikuti dalam urusan-urusan pemerintahan, misalnya penentuan Hari Libur Nasional, maka *isbāt* pemerintah RI ini pada dasarnya hanya mengikat permasalahan tersebut, bukan pada penentuan hari-hari untuk menjalankan aktifitas ibadah, seperti penentuan awal bulan Qamariah.

2. Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.

Dilahirkan di Pamekasan Madura pada tanggal 23 September 1956, ayah dari tiga anak ini tercatat sebagai Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 di UII Yogyakarta. Di Muhammadiyah suami dari Siti Farida, S.Pd. ini menjabat sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur tahun 1990 sampai sekarang. Beberapa buku yang beliau tulis sesuai kapabilitas keilmuannya dalam bidang yang ditekuni dan menjadi salah satu buku rujukan mata kuliah

Fikih Mawāris dan Ilmu Falak adalah *Ilmu Falak; Dasar-dasar Hisab Praktis*, dan *Fiqh Mawāris*.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan Muammal Hamidy dalam mendefinisikan *isbāt* Pemerintah RI, *Ustāz* Mukarram mengatakan *isbāt* adalah penetapan pemerintah RI dalam suatu sidang yang dihadiri ormas-ormas Islam, instansi dan pejabat yang berkaitan untuk menetapkan awal bulan Qamariah. Pada dasarnya apa yang dilakukan pemerintah RI ini baik-baik saja, hanya persoalannya tidak semua organisasi Islam sepakat menerima *isbāt* ini secara konsisten. Hal ini disebabkan persoalan tersebut bukan merupakan wewenang pemerintah RI untuk mengurusinya, karena persoalan penentuan awal bulan Qamariah masuk dalam ranah *fiqhiyyah*, yang syarat dengan *khilāf*. **حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ** seperti yang beliau katakan:

Ya kan ada kaidah dalam hukum yang menyatakan **حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ** atau ada redaksi **حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ** bahwa keputusan pemerintah RI itu menganulir perbedaan, kan seperti itu, iya toch. Itu sebuah kaidah hukum yang sudah sama-sama diketahui oleh para ulama, apakah itu dari pihak NU maupun dari Muhammadiyah, maupun yang lain. Hanya persoalannya sekarang konsistensi. Ambil contoh misalnya begini, ketika Menteri Agamanya dulu masih pak Malik Fajar atau katakanlah bukan orang NU, terjadi perbedaan pendapat, dalil itu tidak pernah digunakan.⁸

Isbāt pemerintah RI pun harus berdasarkan laporan tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan merukyah *hilāl*. Perbedaan yang ada itu dikarenakan adanya beberapa ormas yang masih berpegang teguh

⁸ Mukarram, *Wawancara*, Surabaya, Senin 18 Juli 2011.

dengan pedoman atau metode yang dijadikan sebagai rujukan dalam penentuan awal bulan Qamariah. Selain itu juga, di Indonesia sendiri perbedaan tersebut cenderung ada nilai politisnya.

Tentang kedudukan *isbāt* menurut beliau sama halnya seperti fatwa, sebagai implikasi hukumnya, maka *isbāt* tidak wajib untuk diikuti.

3. Drs. Syamsuddin, M.Ag

Dilahirkan di Bangil pada tanggal 12 September 1967, Syamsuddin memulai pendidikan formalnya pada tingkat dasar di SD Negeri Bangil, tamat pada tahun 1981. Kemudian di SMP Negeri Bangil dan tamat pada tahun 1984, selanjutnya di SMA Muhammadiyah Bangil, tamat pada tahun 1987. Saat studi ditingkat Aliyah, ia juga sambil menimba ilmu di Ma'had Dar al-Lugah Bangil dan tamat pada tahun 1987 juga. Menempuh SI pada Fakultas Syariah UNMUH Surabaya, lulus pada tahun 1992. Selanjutnya jenjang S2 ia tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1996.

Dalam mendefinisikan *isbāt* pemerintah RI KH. Syamsuddin merujuk pada definisi yang ada di dalam kamus. *Isbāt* merupakan *masdar* dari *fi'il maḍi asbata*, dengan mengikuti *wazan af'āla yuf'ilu if'ālan*, yang bermakna proses penetapan. Kemudian secara istilah, *isbāt* menurut beliau adalah penetapan pemerintah yang di dasarkan pada sebuah sidang. Pada dasarnya

setiap ormas Islam, baik itu NU, Muhammadiyah maupun ormas Islam lainnya berhak mengeluarkan penetapan awal bulan Qamariah berdasarkan metode atau caranya masing-masing. Karenanya, wajar jika akhirnya, dalam penentuan awal bulan Qamariah muncul *isbāt* NU, *isbāt* Muhammadiyah, dan *isbāt* pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama.⁹

Mengenai landasan *isbāt* yang digunakan pemerintah RI, menurut Syamsuddin, dikarenakan pemerintah merasa mendapat amanat dari undang-undang untuk ikut dalam penentuan awal bulan Qamariah. Namun, amanat ini hanya terbatas pada fungsi pemerintah sebagai otoritas yang memberikan jaminan keamanan bagi semua warganya dalam menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya. Bukan malah ikut masuk dalam keyakinan tersebut. Beliau menganalogikan pemerintah dengan Raja Jawa yang mempunyai julukan *Sayyidin panotogomo Halifātullah ing tanah Jawa*, yakni pemimpin yang memberikan perlindungan dalam bidang agama, karena ia merasa mempunyai amanat dari Tuhan. Dalam hal ini, pemerintah hanya koordinator saja. Pemikiran Syamsuddin tercermin dalam penegasannya berikut:

pemerintah sifatnya mengakomodir, pemerintah tidak boleh terlalu masuk dalam urusan-urusan yang bersifat partikular, memberikan jaminan keamanan bagi warganya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Kalau disuruh ikut, padahal tata cara penetapannya berbeda, nanti timbul *māzhāb* pemerintah. Seperti peristiwa Mihna dalam sejarah Islam, pegawai

⁹ Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011.

pemerintah harus dari golongan mu'tazilah. Tidak fair, jangan, wong belum ada mazhab pemerintah, lho masih, katakanlah kalau Menteri Agamanya dari NU, itu sudah keliatan menganaktirikan yang lainnya, padahal itu masih person yang menempati, apalagi kalau sudah ada mazhab pemerintah, tambah ngawur ae.¹⁰

Dalam kaitannya apakah *isbāt* harus diikuti, Syamsuddin dengan tegas menyatakan bahwa *isbāt* sama sekali tidak wajib untuk diikuti. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum ada tolak ukur yang sama dalam penentuan awal bulan Qamariah. Seandainya pemerintah memaksakan agar *isbāt*-nya ingin diikuti, maka harus dibentuk sebuah undang-undang yang dibuat oleh DPR, bukan oleh Menteri. Karenanya, menurut beliau *isbāt* yang dilakukan oleh Menteri Agama itu tidak mempunyai kedudukan dalam tata hukum di Indonesia dan juga dalam hukum Islam. Dan yang dimaksud *al-hakim* dalam kaidah *ḥukmul ḥākīm ilzāmun wa yarfa'ul hilāl* menurut Syamsuddin adalah undang-undang. Karenanya kaidah tersebut tidak bisa diberlakukan di Indonesia, yang *notabene* adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila, bukan negara Islam. Karena seandainya kaidah tersebut dipaksakan diberlakukan di Indonesia, maka konsekuensinya harus dibentuk sebuah undang-undang tentang penentuan awal bulan Qamariah, dan ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar, karena memaksakan faham tertentu kepada masyarakat dan ada unsur pelanggaran HAM.

¹⁰ *Ibid.*

Syamsuddin menyarankan, dalam penentuan awal bulan Qamariah hendaknya pemerintah tidak usah ikut campur, cukup kembalikan permasalahan tersebut kepada masing-masing ormas Islam. Biarkan masyarakat mengikuti para tokoh-tokoh ormasnya. Karena menurut beliau, rasa kesetiaan itu jauh lebih besar tumbuh kepada dalam lingkungan atau ormas dimana seseorang berinteraksi, dari pada kepada pemerintah. Lebih lanjut beliau menyarankan, perbedaan yang ada dalam penentuan awal bulan Qamariah hendaknya dihormati. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa penentuan awal bulan Qamariah merupakan persoalan partikular, bukan persoalan universal, dimana yang menjadi pokok perdebatannya adalah tatacara penentuannya (partikular), bukan pada ibadah dalam bulan Qamariah tersebut.¹¹

4. Drs. Nadjib Hamdi, M. Si

Dilahirkan di Lamongan pada tanggal 17 Desember 1964, suami dari Luluk Humaidah ini memulai pendidikan formalnya di MI Muhammadiyah Paciran, kemudian MTs Muhammadiyah Paciran, hingga MA Muhammadiyah Paciran. Pernah juga mengenyam pendidikan di Ma'had Ali Ilmu Fikih dan Dakwah Bangil Pasuruan, selanjutnya menamatkan jenjang S-1 di Fisip jurusan Ilmu Administrasi, S-2 di Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik serta S-3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pernah

¹¹ *Ibid.*

menjabat Ketua PC IPM Paciran, Sekretaris PD IPM Lamongan, Anggota Panwaslu Jatim 2003-2004, Anggota KPU Jatim 2008-2013, dan sekarang beliau menjabat sekretaris PWM Jawa Timur.

Isbāt dalam pandangan Nadjib adalah sebuah pengumuman pemerintah RI tentang penentuan awal bulan Qamariah yang semestinya didasarkan pada beragam pendapat dari seluruh peserta sidang *isbāt*. Namun dalam prakteknya, *isbāt* hanyalah sebuah pengumuman tentang penetapan awal bulan Qamariah yang sudah ditentukan oleh Menteri Agama sebelumnya. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak ada silang pendapat dari para peserta sidang. Menurut Nadjib, *isbāt* murni menggunakan tata cara versi pemerintah, tidak mengakomodir dari metode yang digunakan oleh ormas Islam. Karenanya, *isbāt* pemerintah rawan dengan muatan politis dan bersifat hegemonik. Beliau mencontohkan dalam patokan *hilāl* misalnya, pemerintah memberikan batas minimal 2 derajat. Pembatasan 2 derajat ini, menurut Nadjib tidak mempunyai dasar atau pijakan yang valid.¹²

Sama halnya dengan Syamsuddin, mengenai hukum mengikuti *isbāt*, Nadjib pun berpendapat bahwa *isbāt* sama sekali tidak wajib diikuti. Alasan ini didasarkan pada anggapan beliau tentang kedudukan *isbāt*. Dalam anggapannya, kedudukan *isbāt*, baik dalam hukum Islam maupun tata hukum di Indonesia tidak ada. Dalam hukum Islam beliau tidak menemukan

¹² Nadjib Hamid, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juli 2011.

adanya *isbāt* pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah. Sebab negara Indonesia bukanlah negara Islam yang dengan mudahnya menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Oleh karenanya, seperti kaidah fikhiyah pun tidak bisa diterapkan di negeri ini. Beliau menegaskan, konsep *qadi* hanya bisa diterapkan pada sebuah negara yang menggunakan sistem hukum Islam sebagai pijakannya, seperti Arab Saudi. Ia menambahkan, begitu juga kedudukan *isbāt* dalam tata hukum di Indonesia, tidak ada undang-undang ataupun peraturan menteri tentang kewajiban mengikuti *isbāt* pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah.¹³

Persoalan penentuan awal bulan Qamariah biarlah masyarakat sendiri yang mengurusinya sebagaimana mereka menjalankan aktivitas shalat dalam kehidupan kesehariannya. Pada zaman Nabi, penentuan masuknya waktu shalat memang selalu didasarkan oleh bayang-bayang matahari atau dengan media tongkat, tetapi zaman sekarang cara seperti itu tidaklah digunakan, masyarakat Indonesia cukup melihat jam. Begitu juga dalam memulai awal bulan, selain bulan *Ẓulhijjah*, *Ramaḍān* dan *Syawal*, masyarakat cukup mengacu pada kalender. Nadjib sangat heran dengan tindakan pemerintah (Menteri Agama) yang tidak konsisten dalam menggunakan kalender yang sebetulnya juga produk buatannya. Inkonsistensi ini terbukti pada tindakan pemerintah yang selalu

¹³ *Ibid.*

mengadakan *isbāt* penentuan awal bulan *Žulhijjah*, *Ramaḍān* dan *Syawal* setiap tahunnya. Mestinya, pemerintah tidak perlu melakukan *isbāt* dengan praktek *ru'yah*, mereka cukup mengacu pada kalender saja. Beliau mendasarkan pendapatnya ini pada *hadīs* Nabi dengan mengartikan *ru'yah* sebagai *ta'abbudi ta'aqquli al-ma'na*, yakni *ru'yah* bisa dikembangkan dan dirasionalkan dengan teknologi maupun sistem perhitungan. Dan inilah yang beliau maksud dengan *ru'yah bi al-ilmī*.¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁴ *Ibid.*

BAB IV

STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PARA TOKOH STRUKTURAL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG *ISBAT* PEMERINTAH RI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH

Analisis dalam bagian ini merupakan pembacaan verifikatif dalam paradigma kaidah fikih *حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ* terhadap pandangan para tokoh PWNU dan PWM Muhammadiyah mengenai penetapan pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah. Analisis ini memang menggunakan sudut dari pandangan penulis, namun bukan berarti bermaksud menghakimi, melainkan untuk mendiskusikan posisi pendapat mereka tentang *isbat* pemerintah dihadapan kaidah fikih, dan tentunya dihadapan dalil-dalil yang lain.

A. Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang *Isbat* Pemerintah RI dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Pandangan atau pendapat yang disampaikan Drs. K.H. Syafruddin Syarif dan K.H. Abdurrahman Navis pada dasarnya hampir sama. Dalam mendefinisikan *isbat* pemerintah, mereka berdua sama-sama menggunakan kaidah *fiqhiyah*, hanya pemilihan redaksinya yang berbeda. Syafrudin

menggunakan redaksi **حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ** sedangkan Abdurrahman lebih memilih redaksi **إِقْتِضَاءُ الْحَاكِمِ الزَّامُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ** namun inti dari kedua kaidah ini sama. Dalam artian, *isbāt* merupakan implementasi dari kedua kaidah tersebut, yakni menempatkan posisi pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama sebagai pemegang otoritas yang berwenang dalam penentuan awal bulan Qamariah. Penulis sendiri lebih sepakat dengan redaksi yang digunakan oleh Syafruddin. Namun pendefinisian mereka akan janggal manakala dihadapkan pada implikasi hukum yang mereka sampaikan.

Tentang implikasi hukum yang ditimbulkan dari terminologi *isbāt* yang disampaikan oleh Syafruddin adalah bahwa *isbāt* hanya mengikat ketika *isbāt* sudah memenuhi persyaratan, yakni didasarkan atas *ru'yah* atau *istikmāl*.

Karenanya, wajib hukumnya mengikuti *isbāt* tersebut. Sebagai implikasinya, jika tidak diikuti, puasa yang dilakukan tidak sah. Lain halnya dengan Syafruddin, Abdurrahman, mengatakan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa *isbāt* pemerintah wajib diikuti. Dalam hal ini dia memposisikan pemerintah sebagai *waliyyul amri darūriy bi as-syaukah*, pemimpin yang hanya wajib diikuti dalam kondisi tertentu saja. Misal dalam permasalahan yang bersifat universal, seperti wali nikah. Pandangan Syafruddin Syarif dan Abdurrahman Navis tentang keberadaan *isbāt* ini sangat sejalan dengan pandangan organisasinya, NU. Sangat wajar memang, mengingat mereka berdua adalah salah satu 'produk' ormas Islam tersebut.

Dalam hal ini penulis sendiri memandang pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, memiliki peran penting dalam memelihara suasana yang kondusif dalam masyarakat bila terjadi perselisihan, baik dalam urusan kehidupan sosial maupun dalam praktek keagamaan. Dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, terlebih dalam penentuan awal bulan Qamariah, peran pemerintah sangat dibutuhkan, hal ini tak lepas dari keterlibatan penentuan awal bulan bulan Qamariah yang selalu melibatkan ormas Islam paling besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah.

Pemerintah sendiri dalam mengakomodir perbedaan tersebut telah memunculkan gagasan tentang *imkān ar-ru'yah*. *Imkān ar-ru'yah* memiliki kriteria batasan minimal tinggi *hilāl* yang memungkinkan *hilāl* dapat dilihat, yaitu 2 derajat, jarak dari matahari minimal 3 derajat, atau umur bulan saat matahari terbenam minimal 8 jam. Tapi kriteria *imkān ar-ru'yah* ini perlu ada revisi dalam dua hal sebagaimana hasil penelitian Thomas Djamaluddin yang diungkapkan oleh Ahmad Izzuddin, yaitu jarak bulan dari matahari yang semula minimal 3 derajat menjadi 5 sampai 6 derajat, kemudian tinggi *hilāl* minimal tidak lagi seragam 2 derajat, tetapi harus memperlihatkan beda azimut bulan matahari.¹

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama melalui kekuasaan sidang *isbāt*, sebenarnya mempunyai peluang untuk dapat diterima oleh semua

¹ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Ru'yah*, 143.

pihak. Upaya pemerintah ini pada dasarnya berpijak pada usaha tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat Islam Indonesia. *Hujjah* yang digunakan:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ²

Yakni keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perbedaan silang pendapat, sehingga ketika pemerintah sudah memutuskan, baik atas dasar *hisāb* maupun *ru'yah*, maka seluruh komponen masyarakat harus mematuhi.

Penentuan awal bulan Qamariah yang dilakukan pemerintah adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam, sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan umat dalam hal yang terkait penentuan awal bulan tersebut.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³

Dari kedua kaidah tersebut dapat diartikan bahwa segala kebijakan pemerintah harus melihat efek kemaslahatan, jangan sampai pemerintah sewenang-wenang dengan kekuasaannya hanya mementingkan kepentingan sepihak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat dalam memahami perbedaan akan terbentuk. Dari kaidah ini bisa diambil pelajaran juga bahwa persoalan

² 'Abd. al-Ḥāmid as-Syarwānī, *Hāsiyah*, 383.

³ as-Suyūṭī, *al-Asybah*, 83-84.

yang bersifat kemasyarakatan perlu adanya campur tangan *ūlīl amri* (pemerintah).

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa penetapan awal dan akhir bulan Ramadān harus ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pemerintah sudah mengambil keputusan, maka wajib untuk diikuti.⁴

Sementara Jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) tidak mengharuskan adanya penentuan dari pemerintah, tetapi jika pemerintah sudah mengeluarkan keputusannya, maka wajib diikuti.⁵ Dalam surat An- Nisa' ayat 59 pun kita diwajibkan untuk selalu taat kepada pemerintah.

Dengan adanya Badan *Hisāb* Rukyah sebagai kepanjangan dari pemerintah diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam setiap pertemuan antara ormas Islam. sehingga nantinya dapat menemukan solusi bagaimana penyatuan awal bulan Qamariah dapat terlaksana. Selain itu, MUI sebagai organisasi keulamaan telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang intinya adalah agar seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam menentukan awal bulan Qamariah selalu mengikuti keputusan pemerintah. Setidaknya dengan terbentuknya MUI oleh pemerintah, menaati MUI sama dengan menaati pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam menentukan awal bulan Qamariah sangat penting. Bahkan bila diperlukan pemerintah membuat undang-

⁴ 'Abdurrahman al-Jāziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz I, (Dār Iḥya' al-Turas al-Arabi, 1986), 433.

⁵ *Ibid.*

undang mengenai penentuan awal bulan Qamariah, sekaligus mengatur kriteria *imkān ar-ru'yah* yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apabila ada masyarakat yang tidak mentaati keputusan pemerintah dapat dikenakan hukuman.

Dalam memandang *isbāt* pemerintah Syafruddin Syarif dan Abdurrahman Navis merujuk pada keputusan Muktamar NU ke 20 di Surabaya yang menyatakan sebagai berikut:

sesungguhnya mengabarkan tetapnya awal Ramaḍān atau Syawal dengan *hisāb* itu tidak terdapat di waktu Rasullāh dan Khulafāur Rāsyidīn. Sedang pertamanya orang yang membolehkan puasa dengan *hisāb* ialah Imam Muṭarif guru Imam Bukhāri. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramaḍān atau Syawal berdasarkan *hisāb* sebelum ada penetapan atau siaran dari Depag, maka muktamar memutuskan tidak boleh. Sebab untuk menolak keguncangan dalam kalangan umat Islam dan muktamar mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya⁶

Dari keputusan tersebut, mereka cenderung ingin mencari jalan tengah dari perbedaan yang ada, yaitu dengan menyatakan bahwa pemerintah bila menetapkan awal bulan Qamariah berdasar *hisāb*, tidak wajib diikuti. Artinya memberikan peluang bagi orang untuk memilih antara berhari raya ikut pemerintah atau tidak. Bagi Syafruddin Syarif dan Abdurrahman Navis sendiri tentu tidak akan mengikuti keputusan pemerintah tersebut.

Syafruddin Syarif dan Abdurrahman Navis masih *kekeh* (teguh) dengan pendapatnya, sangat sulit sekali pandangan yang sudah mengakar

⁶ Imam Ghazali (eds), *Ahkāmul Fuqaha'; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes NU*, (Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama, 2007), 283-284.

terhadap jiwa kedua tokoh PWNU Jatim tersebut untuk dirubah sedemikian rupa. Karena keduanya juga memiliki dalil-dalil yang *sahih* sendiri dalam permasalahan penentuan awal bulan Qamariah.

Selain itu pemerintah memang sedikit kurang tegas dalam hal metode yang digunakan, antara *ru'yah* dan *hisāb*, karena pemerintah dalam hal ini pun justru memberikan kebebasan kepada ormas Islam di Indonesia untuk menggunakan metodenya masing-masing. Sehingga sikap pemerintah ini terkesan bukan malah ingin menyatukan tapi membebaskan kepada siapa saja untuk memilih metode yang digunakan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Syafuruddin Syarif dan Abdurrahman Navis dalam memandang keberadaan *isbāt* pemerintah tentang penentuan awal bulan Qamariah sangat diperlukan sebagai jalan tengah dari dua metode yang berbeda yang digunakan NU maupun Muhammadiyah, tetapi dalam realisasi *isbāt* pemerintah tersebut terkadang masih belum bisa dipatuhi secara utuh oleh ormas-ormas yang berbeda. Apalagi kalau pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama yang menjabat dari salah satu kedua ormas tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap objektivitas ketetapan itu. Selain itu, mereka memandang kedudukan *hisāb* hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan *ru'yah*.

B. Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Isbāt* Pemerintah RI Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Berdasarkan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Qamariah berdasarkan *hisāb*, dari *hisāb* inilah dalam Muhammadiyah muncul istilah *wujūd al-hilāl*,⁷ yang mana dalam kriterianya bulan sudah satu kali edaran penuh (*ijtima*), awal bulan dimulai pada saat terbenam matahari dan matahari lebih dulu terbenam daripada bulan, masuk sudah dinyatakan bulan baru. Sehingga dalam penentuan awal bulan Qamariah tidak perlu menunggu adanya *ru'yah* di lapangan, apalagi menunggu *isbāt* pemerintah. Kiranya putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini bisa menggambarkan pandangan Muammal Hamidy, Mukarram, Nadjib Hamid terhadap keberadaan *isbāt* pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah. Selain itu juga, keikutsertaan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Qamariah lewat *isbāt* mengharuskan syarat yang bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan *syarʿ* dan data astronomis yang valid. Pada dasarnya pandangan Syamsuddin tentang kriteria *wujūd al-hilāl* yang digunakan Muhammadiyah tak jauh berbeda dengan tiga tokoh lainnya di atas, hanya saja Syamsuddin dalam memandang *isbāt* pemerintah RI dia lebih terfokus pada kedudukan *isbāt* itu sendiri, dimana ia memandang *isbāt* tidak mempunyai kedudukan, baik dalam hukum Islam

⁷ Lihat: Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 293.

maupun tata hukum di Indonesia, karenanya menurut beliau *isbāt* sama sekali tidak wajib diikuti.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Muammal Hamidy, Mukarram, Nadjib dan Syamsuddin *isbāt* pemerintah hanya formalitas saja. Bahkan menurut Syamsuddin dan Nadjib *isbāt* itu tidak ada, tidak ditemukan dalam hukum Islam. Mukarram pun sama, *isbāt* pemerintah layaknya ada, tetapi tidak ada, dia mengistilahkan *وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ*. Menurut mereka pemerintah tidak usah terlalu ikut campur dalam urusan yang bersifat *ijtihādiyyah* (istilah yang digunakan Mukarram) atau bersifat *khilāfīyah* (istilah yang digunakan Syamsuddin) Perbedaan yang ada sudah merupakan suatu keniscayaan. Sebagai implikasi hukumnya, *isbāt* pemerintah tidak wajib diikuti.

Namun pandangan Muammal Hamidy, Mukarram, Nadjib dan Syamsuddin dalam hal ini kiranya tidak sejalan dengan kaidah hukum Islam. Dimana sidang *isbāt* yang dilakukan oleh pemerintah (Menteri Agama) dihadiri oleh semua elemen, baik dari MUI maupun dari ormas-ormas Islam lainnya. Sehingga dalam sidang tersebut mestinya telah terjadi musyawarah mufakat yang disepakati oleh semua perwakilan, yang mana hasilnya bisa dikatakan sebagai *ijma'* semua ulama maupun ahli-ahli dalam bidang ilmu falak.

Mengenai pendapat Muammal yang menyatakan bahwa metode *hisāb* lah yang lebih cocok untuk dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan

Qamariah dibanding metode lainnya, penulis kira itu pernyataan sepihak dari beliau. Dan pendapat ini juga sejalan dengan kaidah:

الْأَصْلُ فِي اثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ⁸

“Hukum asal pada penetapan awal bulan adalah hisāb”

Karena justru *hisāb* saja tanpa adanya pembuktian di lapangan, merupakan sebuah retorika teori yang bisa dikatakan benar atau salah. Jadi *hisāb* tanpa ru'yat tidak akan ada artinya, begitu juga sebaliknya ru'yat tanpa perhitungan yang valid akan menyesatkan belaka. Oleh karena itu antara *hisāb* dan ru'yat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai sarana menentukan awal bulan Qamariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sinyalemen adanya muatan politis dalam penentuan awal bulan

Qamariah, sebagaimana yang disampaikan Mukarram, Nadjib dan Syamsuddin kiranya ada benarnya juga. Ini dapat dibuktikan dari fenomena yang terjadi pada masa Orde Baru. Saat itu *isbāt* pemerintah selalu paralel dengan hasil perhitungan Muhammadiyah. Mengingat keputusan Majelis Tarjih selalu dimasukkan sebagai konsideren dalam penentuan awal bulan Qamariah. Sehingga tidak ada persoalan dengan pemerintah. Walaupun secara realitas, pada penetapan 1 Syawal 1418 H/1998 M secara terang-terangan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah.⁹ Menurut analisis Ahamd

⁸ Lihat: *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 77.

⁹ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Ru'yah di Indonesia*, 12.

Izzuddin, karena waktu itu pemerintah baru bermasalah dengan Amien Rais (saat itu sebagai Ketua Umum Muhammadiyah), maka dalam penentuan 1 Syawal 1418 H/1998 M waktu itu pemerintah berusaha untuk mendekat NU. Walaupun pada waktu itu Menteri Agama (dr. Tarmidzi Tahir) tidak dari unsur NU.

Pendapat Muammal dan Nadjib mengenai masalah keagamaan, yakni penentuan awal bulan Qamariah seharusnya diserahkan kepada ahlinya saja, yaitu ulama, boleh dikatakan ada benarnya, tetapi itu terjadi apabila masalah keagamaan yang tidak menimbulkan perbedaan signifikan atau gejolak dalam masyarakat. Dalam masalah penentuan awal bulan Qamariah, dari segi ibadah mestinya tidak ada masalah karena perbedaan dalil ini memunculkan hasil penentuan awal bulan Qamariah yang berbeda pula. Namun pada realitasnya, perbedaan tersebut berimbas terhadap kehidupan sosial masyarakat yang begitu luas, sehingga terkesan ada pengelompokan dalam umat Islam di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini harus mengambil alih terhadap penentuan awal bulan tersebut. Dengan mendasarkan pada kaidah *حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ* pemerintah bisa mengambil alih otoritas penentuan awal bulan Qamariah dari ormas-ormas yang berbeda menjadi satu dalam bingkai *isbāt* pemerintah. Dan pemerintah menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia untuk mengikuti keputusan pemerintah tersebut dengan tidak mempermasalahkan metode yang digunakan, apakah itu *hisāb* atau *ru'yah*.

Menanggapi pendapat Nadjib Hamid mengenai *isbāt* hanya merupakan pengumuman dari Menteri Agama yang sudah menentukan jatuhnya awal bulan Qamariah tanpa ada silang pendapat atau masukan dari para peserta sidang *isbāt* sehingga terkesan hegemonik, bagi penulis kiranya kurang tepat. Sebab dalam prakteknya, sejak adanya *isbāt* penentuan awal bulan Qamariah yang dikoordinir oleh Menteri Agama, pemerintah selalu melibatkan tokoh-tokoh dari semua ormas Islam dan instansi yang terkait serta perwakilan dari Planetarium untuk ikut sidang, merumuskan dan memutuskan jatuhnya awal bulan Qamariah. Sehingga hasil sidang *isbāt* pun sudah disepakati oleh seluruh peserta yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan mengenai saran Syamsuddin yang menyarankan jika memang pemerintah hendak memaksakan masyarakat untuk selalu mengikuti *isbāt*-nya dengan membentuk undang-undang, penulis menanggapi bahwa saran tersebut kiranya belum bisa diterapkan di Indonesia, sebab andaikan pemerintah membuat undang-undang tentang penentuan awal bulan Qamariah, sebagai konsekuensi jika ada yang melanggar (tidak ikut *isbāt* pemerintah) maka akan dipidana, itu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan memaksakan sebuah keyakinan seseorang sangat mengandung unsur pelanggaran HAM, sebagaimana yang Syamsuddin nyatakan dalam pandangannya mengenai kedudukan *isbāt* pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Qamariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Struktural PWNU Jawa Timur, yakni Drs. Syafruddin Syarif dan K.H.

Abdurrahman Navis memandang *isbat* pemerintah lebih diposisikan sebagai jalan tengah terhadap perbedaan yang terjadi selama ini dalam penentuan awal bulan Qamariah. Pandangan ini sesuai dengan keputusan Mukthamar NU ke 20 di Surabaya, pemerintah hanya akan diikuti ketika keputusan yang diambil berdasar *ru'yah* atau *istikmāl*.

2. Secara umum para tokoh Struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur, yakni K.H. Muammal Hamidy, Lc, Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum, Drs. Syamsuddin, M. Ag, dan Drs. Nadjib Hamid, M. Si memandang *isbat* pemerintah hanya sebagai otoritas, artinya hanya memiliki kewenangan berdasarkan kekuasaan saja. Dalam hal ini *isbāt* pemerintah akan diikuti, jika pemerintah dalam hal memutuskan awal bulan Qamariah bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan *syar'ī* dan data astronomis yang valid.

Drs. Syamsuddin, M. Ag, dan Drs. Nadjib Hamid, M. Si bahkan memandang kedudukan *isbāt*, baik dalam hukum Islam dan hierarki tata hukum di

Indonesia tidak ada. Begitu juga pandangan Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum, hanya saja dia lebih arif dalam memandang keberadaan *isbāt*, yakni beliau menganggap sejatinya *isbāt* itu baik-baik saja, namun ia tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat. Sedang Muammal Hamidy dalam memandang keberadaan *isbāt*, khususnya di Indonesia tidak berlaku. *Isbāt* hanya bisa diberlakukan di negara Islam.

3. Dalam hukum Islam, keharusan mengikuti *isbāt* pemerintah memang tidak diatur secara tegas. Namun, mengingat perbedaan penentuan awal bulan Qamariah cenderung menimbulkan sikap arogansi terhadap sesama umat muslim dan bisa memicu terjadinya perselisihan serta menimbulkan gejolak dalam masyarakat, maka *ūlī amri* (pemerintah) mempunyai wewenang mengatur demi menghindari dampak negatif (*mazārat*) yang akan muncul. *Ūlī amri* mempunyai tugas utama *fi harāsah ad-din* (menjaga agama) dan *fi siyāsah ad-dunyā* (mengatur urusan dunia) dengan menciptakan perangkat undang-undang dan demi terwujudnya kemaslahatan umum. Sehingga meskipun tidak ditemukan *nash* yang menyebutkan secara pasti tentang kewajiban mengikuti *isbāt* pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariah, harus dipatuhi dalam rangka menciptakan kemaslahatan umum, maka *isbāt* layak untuk diikuti.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenag sudah berusaha menjembatani berbagai perbedaan yang terjadi, akan tetapi semuanya kembali kepada masing-

masing individu, apakah mau menjadikan jembatan tersebut sebagai alat pemersatu atau tidak. Jika pemerintah sudah tidak dapat menyatukan perbedaan, lalu siapakah yang diharapkan oleh semua orang untuk menjadi *ulīl amri* agar keputusannya diikuti oleh semua orang.

2. Pemerintah (Kemenag) sebagai otoritas yang memiliki kewenangan luas, harus berupaya keras duduk bersama dengan para tokoh ormas Islam, terlebih para tokoh NU dan Muhammadiyah untuk mencari titik temu bagaimana diperoleh kriteria yang sama dalam penentuan awal bulan Qamariah.
3. Perlu ada sikap *legawa* dari masing-masing tokoh ormas Islam beserta para anggotanya untuk mengedepankan kepentingan bersama sebagai umat Islam di Indonesia agar tercipta suasana yang damai dan bersatu.
4. Perlu adanya pemahaman masyarakat bahwa keputusan pemerintah merupakan sebuah konsesus dari para ahli dalam bidangnya, sehingga menjadikan masyarakat lebih dewasa dalam memahami suatu perbedaan, perbedaan bukanlah untuk menimbulkan perpecahan, tetapi untuk menumbuhkan rasa saling menghormati terhadap sesama muslim.
5. Perlu adanya pengembangan alat teknologi yang canggih untuk melihat *hilāl* sehingga dapat mengakomodasi integrasi metode *ru'yah* dan metode *hisāb*.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak, Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, Sidoarjo: Aqaba, 2009

-----, Tradisi Fikih NU; Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam, *mimco*, Disertasi S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abdusshomad Buchori, *et al*, *101 Masalah Hukum Islam Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, MUI Jawa Timur bekerja sama dengan Pustaka Dai Muda, 2003

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. jilid I

Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisāb Ru'yah di Indonesia; Upaya Penyatuan Mazhab Ru'yah dengan Mazhab Hisāb*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003

-----, *Ilmu Falak*, Jakarta, CV. Tarity Samudra Berlian, 2006

al, Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, jilid I, 1986

-----, *Al-Fiqh 'Ala al Mazāhib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, diterjemahkan oleh Husni Syawie, Jakarta: PT. Lentera Basri Tama, 1998

al, Bājūrī, Ibrahim *Hāsiyah al-Bājūrī 'ala Ibnī al-Qāsim*, juz I, Dar Kutub al-Islami, t.t.

al, Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhim, *Ṣahīh Bukhāri*, Jilid II

Andi Ahmad Zaelany, Menentukan Hari Lebaran Ala Islam Jawa, Kasus Dusun Golak Ambarawa, dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, vol. VI, 1996

as, Syarwāni, Abd al-Ḥamid, *Hāsiyah as-Syarwāni 'ala Tuhfah al-Muhtāj*, Mesir: Maktabah Tijāriyah Kubrā, t.t. jilid III

as, Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fi al-furu'*, cetakan I, Surabaya: al-Hidayah, 1965

at, Tirmizi, Abu Isa' Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, juz II, Beirut: Dar al Fikr, 1994

- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cetakan I, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisāb & Ru'yah, Telaah Syari'ah, Sains Dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ibnu Rusyd, *Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Beirut: Dar Ibn 'Aṣāmah, 2005
- Imam Ghazali (eds), *Ahkāmul Fuqaha'; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes NU*, Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama, 2007
- Mudzakkir, "Pedoman Hisab Ru'yat Departemen Agama RI," *mimeo*, Semarang: Lajnah Falakiah PBNU, 2006
- Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- Muhammad Syaṭa' al-Dimyati, *I'ānah at-Tālibīn*, juz V, Semarang: Karya Toha Putera, t.t.
- Mukharrom, *Penetapan Awal Bulan Qamariah dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi*, Jakarta: Raja Grafindo, t.t.
- Nasaruddin Umar, "Memahami Hak Isbāt dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *mimeo*, Semarang: Lajnah Falakiah PBNU, 2006
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an-terj. Mafhum an-Nash Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* (penerjemah: Khoiron Nahdliyyin), cetakan II, Yogyakarta: LKIS, 2002
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1426-1427H/2006 M
- Setyo Purwadi, "Mengapa Idul Fitri Bisa Berbeda: Telaah Terhadap Pemikiran Ahli Ru'yah dan Ahli Hisāb", *Jurnal Hukama* Vol. 1, Januari 2007
- Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi atas Pemikiran Sa'adoeddin Djambek*, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- T. Djamaluddin, "Imkān al-Ru'yah: Parameter Penampakan Sabit Hilāl dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)," *mimeo*, Semarang: Lajnah Falakiah PBNU, 2006
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cetakan I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Zakie Fitrie Mustofa, *Studi Analisis Terhadap Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlaul Ulama'*, skripsi sarjana S1 IAIN Surabaya, 2008

BADILAG BIMAS Dep. Agama RI, *Himpunan Keputusan Penetapan 1 Menteri Agama Tentang Ramaḍān dan 1 Syawal Tahun 1381-1418 H/ 1997 M*, Jakarta: Badilag BIMAS, 1999-2000

BADILAG BINBAGA ISLAM Dep. Agama RI, *Pedoman Teknik Ru'yah*, Jakarta: BADILAG BINBAGA ISLAM, 1983-1984

BADILAG Mahkamah Agung RI, *Almanak Hisab Ru'yah*, Jakarta: BADILAG, 2007

DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009

Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman Hisāb Ru'yah NU*, Jakarta: LF NU, 2006

Uswah, edisi MPA 297/Juni 2011

Pedoman Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009

Abdurrahman Navis, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011

Muammal Hamidy, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juli 2011

Mukarram, *Wawancara*, Surabaya, Senin 18 Juli 2011

Nadjib Hamid, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juli 2011

Syafruddin Syarif, *Wawancara*, Surabaya, 14 Juli 2011

Syamsuddin, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2011